

**EVALUASI KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



**Oleh:
Niken Marita Pratiwi
NIM 12808141008**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN–JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

**EVALUASI KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Oleh:
Niken Marita Pratiwi
NIM 12808141008

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 23 Januari 2017
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Manajemen – Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing



Musaroh, M.Si.
NIP. 19750129 200501 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

EVALUASI KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:
Niken Marita Pratiwi
NIM 12808141008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Februari 2017 dan dinyatakan telah lulus.

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA			
DEWAN PENGUJI			
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Winarno, M.Si.	Ketua Penguji		21 / 03 / 2017
Musaroh, M.Si.	Sekretaris Penguji		27 / 03 / 2017
Muniya Alteza, M.Si.	Penguji Utama		17 / 03 / 2017

Yogyakarta, 29 Maret 2017
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,




Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niken Marita Pratiwi

NIM : 12808141008

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah pada
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 22 Januari 2017

Penulis,



Niken Marita Pratiwi
NIM 12808141008

MOTTO

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami
mohon pertolongan”.

(Q.S. Al-Fatihah: 5)

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar
dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan
baik”.

(HR. Thabrani)

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah”.

(Abu Bakar Sibli)

“Jangan pernah berhenti berusaha meskipun berkali-kali gagal, dari kegagalan
itulah kita menjadi tegar dan bangkit dari keterpurukan”.

(Niken Marita Pratiwi)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat yang tidak terhingga sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.
2. Orang tua saya Ibu Rusmiyatun dan Bapak Radiman yang sangat saya cintai, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan.
3. Kakak saya Yesita Dewi Mayangsari, A. Md. yang saya sayangi, terima kasih atas doa dan motivasi yang selalu diberikan.
4. Kekasih saya Bayu Abdi Prayogo, A. Md. Pas, terima kasih atas doa, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan.
5. Sahabat terbaik saya Dwi Riski Wulandari, terima kasih atas doa dan semangat yang selalu diberikan.
6. Sahabat saya Ratria Agustiyandari dan Nia Lestianti, terima kasih atas semangat yang selalu diberikan.
7. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta.

EVALUASI KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:

Niken Marita Pratiwi

NIM. 12808141008

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Proksi pengukuran kinerja keuangan menggunakan perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Keserasian Belanja, sedangkan proksi pada pengukuran kemampuan keuangan menggunakan perhitungan *Share and Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial untuk pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012-2014 yang diprosikan dengan perhitungan Rasio Kemandirian memiliki kriteria delegatif, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki kriteria baik, Rasio Efektivitas memiliki kriteria sangat efektif, Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Aparatur dibandingkan Belanja Publik, dan Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan Belanja Langsung; (2) Kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012-2014 yang diprosikan dengan perhitungan *Share and Growth* diperoleh rata-rata nilai *share* sebesar 48,8% dan rata-rata nilai *growth* sebesar 19,1%; hal ini berarti nilai *share* dan nilai *growth* dapat dikatakan tinggi, sedangkan Peta Kemampuan Keuangan Daerah terletak pada Kuadran I atau dalam kondisi ideal, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) diperoleh skala indeks menunjukkan angka 0,40318 yang berarti Kemampuan Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong sedang.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

**AN EVALUATION OF THE LOCAL FINANCIAL PERFORMANCE AND
CAPABILITY AT THE REVENUE, FINANCE AND ASSET MANAGEMENT
AGENCY (RFAMA) OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION**

By:

Niken Marita Pratiwi
NIM 12808141008

ABSTRACT

This study aimed to assess the local financial performance and capability at the Revenue, Finance and Asset Management Agency (RFAMA) of Yogyakarta Special Region. The proxy for the financial performance measurement used the calculation of the Independence Ratio, Fiscal Decentralization Degree Ratio, Effectiveness Ratio, Activity Ratio, and Expenditure Harmony Ratio, while the proxy for the financial capability measurement used the calculation of the Share and Growth, Local Financial Capability Map, and Financial Capability Index.

The study used the case study method with the qualitative-quantitative approaches. The research subject was the Revenue, Finance and Asset Management Agency (RFAMA) of Yogyakarta Special Region. The research data were secondary data in the form of reported data on the realization of the Local Government Budgets of the Province of Yogyakarta Special Region in 2012-2014. The data analysis techniques were descriptive and inferential statistics for decision making.

The results of the study were as follows. (1) The financial performance at the Revenue, Finance and Asset Management Agency (RFAMA) of Yogyakarta Special Region during the fiscal years 2012-2014 using the proxy of the calculation of the Independence Ratio was delegating, the Fiscal Decentralization Degree Ratio was good, the Effectiveness Ratio was very effective, the Activity Ratio showed that the Provincial Government of Yogyakarta Special Region spent more funds on the Apparatus Expenditure than on Public Expenditure, and the Expenditure Harmony Ratio showed that the Provincial Government of Yogyakarta Special Region spent more funds on the Indirect Expenditure than on the Direct Expenditure. (2) The financial capability at the Revenue, Finance and Asset Management Agency (RFAMA) of Yogyakarta Special Region during the fiscal years 2012-2014 using the proxy of the calculation of the Share and Growth showed an average share value of 48.8% and an average growth value of 19.1%; these indicated that share and growth values were high, while the Local Financial Capability Map was in Quadrant I or in the ideal condition, and the Financial Capability Index showed an index scale of 0.40318, indicating that the Financial Capability of the Province of Yogyakarta Special Region was moderate.

Keywords: *Local Financial Performance, Local Financial Capability, Revenue, Finance and Asset Management Agency (RFAMA) of Yogyakarta Special Region.*

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Setyabudi Indartono, Ph.D., Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Musaroh, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
5. Muniya Alteza, M.Si., Narasumber dan Penguji utama yang telah mendampingi dan memberikan masukan dalam seminar proposal, menguji, dan mengoreksi skripsi ini.
6. Winarno, M.Si., Ketua Penguji yang telah memberikan pertimbangan dan masukan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Semua dosen Program Studi Manajemen yang telah memberikan bekal

ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memasuki dunia kerja.

8. Kedua Orang Tua penulis Bapak Radiman dan Ibu Rusmiyatun atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti.
9. Saudara kandung penulis Yesita Dewi Mayangsari atas doa dan bimbingan yang diberikan.
10. Rekan-rekan mahasiswa manajemen yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan. Penulis berharap supaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 22 Januari 2017

Penulis



Niken Marita Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2. Laporan Keuangan.....	16
3. Persamaan dan Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Komersial.....	25
4. Analisis Laporan Keuangan.....	34
B. Penelitian Relevan.....	44

C. Kerangka Pikir.....	47
D. Paradigma Penelitian.....	51
E. Pertanyaan Penelitian	52
BAB III. METODE PENELITIAN.....	54
A. Desain Penelitian.....	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	54
D. Objek dan Subjek Penelitian	60
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	60
F. Tahapan Penelitian Studi Kasus.....	62
G. Teknik Analisis Data	64
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	71
B. Hasil Penelitian.....	73
1. Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta	74
2. Pengukuran Kemampuan Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta	98
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Komersial.....	29
Tabel 2. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	37
Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	38
Tabel 4. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran.....	42
Tabel 5. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	44
Tabel 6. Indikator Tingkat Kemandirian Daerah.....	65
Tabel 7. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal	65
Tabel 8. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	66
Tabel 9. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran.....	68
Tabel 10. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	70
Tabel 11. APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2014	71
Tabel 12. Rasio Kemandirian APBD DIY Anggaran Tahun 2012-2014.....	75
Tabel 13. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014	80
Tabel 14. Rasio Efektivitas APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014	84
Tabel 15. Rasio Belanja Aparatur APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014	87
Tabel 16. Rasio Belanja Publik APBD DIY Anggaran Tahun 2012-2014.....	90
Tabel 17. Rasio Belanja Langsung APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014.....	93
Tabel 18. Rasio Belanja Tidak Langsung APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014.....	96
Tabel 19. Perhitungan Share APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 20. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah	100
Tabel 21. Perhitungan Rasio <i>Growth</i> Tahun Anggaran 2012-2014.....	100
Tabel 22. Perhitungan Indeks <i>Growth</i> APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014	106
Tabel 23. Indeks <i>Growth</i> APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014.....	106
Tabel 24. Perhitungan Nilai Elastisitas APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014	107
Tabel 25. Perhitungan Indeks Elastisitas APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014	107
Tabel 26. Indeks Elastisitas APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014 ...	107
Tabel 27. Perhitungan Nilai <i>Share</i> APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014	108
Tabel 28. Perhitungan Indeks <i>Share</i> APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014	108
Tabel 29. Indeks <i>Share</i> APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014	109
Tabel 30. Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja dan Kemampuan Keuangan...	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Paradigma Penelitian.....	51
Gambar 2. Rasio Kemandirian APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014	75
Gambar 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014	80
Gambar 4. Rasio Efektivitas APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014.....	84
Gambar 5. Rasio Belanja Aparatur APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014.....	88
Gambar 6. Rasio Belanja Publik APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014	91
Gambar 7. Rasio Belanja Langsung APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014	94
Gambar 8. Rasio Belanja Tidak Langsung APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014	96
Gambar 9. Peta Kemampuan Keuangan Daerah.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah versi PERMENDAGRI Tahun 2012.....	120
Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah versi PERMENDAGRI Tahun 2013.....	122
Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah versi PERMENDAGRI Tahun 2014.....	124
Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2012	126
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2013	128
Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2014	130

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah. Tingkat pencapaian ini diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan keuangan merupakan kesesuaian dari capaian hasil kinerja keuangan dengan target yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam pembuatan keputusan. Evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan agar pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Menurut Mahmudi (2010) Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit kerja di dalamnya. Penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah salah satu wujud dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan.

Laporan keuangan pemerintah daerah perlu ditingkatkan kualitasnya agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan dan merugikan pihak-pihak

yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang apa yang telah terjadi saja karena bersifat historis, sehingga timbul kesenjangan kebutuhan informasi. Analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengatasi kesenjangan tersebut. Kesenjangan kebutuhan informasi dapat diatasi dengan cara mengolah kembali laporan keuangan, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan melakukan prediksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, nyatanya tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan dapat mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan.

Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2010). Beberapa jenis rasio

keuangan seperti analisis perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aset, analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan analisis profitabilitas kurang relevan untuk sektor publik. Rasio-rasio tersebut lebih cocok untuk sektor bisnis yang mencari laba, karena tujuan menggunakan rasio tersebut adalah dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Sementara itu, informasi laba tidak tersedia pada sektor publik menyebabkan analisis keuangan yang biasa digunakan pada sektor bisnis tidak dapat diaplikasikan di sektor publik.

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah diproksikan dengan perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Keserasian Belanja dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemampuan keuangan daerah diproksikan dengan perhitungan *Share and Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Perhitungan dari masing-masing rasio dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Menurut UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang

diterima secara internasional. Masyarakat kini telah berada pada era keterbukaan, teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin maju, dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi informasi publik, karena masyarakat semakin cerdas dalam menuntut adanya transparansi untuk memperoleh informasi yang aktual dan faktual.

Penelitian ini mengambil objek pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta karena keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlakunya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagi Yogyakarta yang dikenal sebagai urusan konkuren dengan berbagai rinciannya, yaitu suatu urusan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom. Penanganan maupun pengelolaan suatu urusan, dalam konteks ini terkait keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari adanya pendanaan. Pendanaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, agar tujuan suatu program dan kegiatan bisa tercapai. Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memberikan pengaturan, bahwa Pemerintah Pusat yang memberikan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Mertokusumo, 2008). Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2014 kinerja keuangan pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif

mengalami penurunan dari tahun ke tahun terutama di pemerintahan kabupaten/kota.

Fenomena tersebut menjadikan alasan penulis untuk mengangkat judul ini, dengan melihat bagaimana kinerja pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melewati fenomena tersebut. Berdasarkan hakekat otonomi daerah yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran sebanyak 4 indikator ditentukan oleh faktor sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolok ukur dari total indikator telah memenuhi target sebesar 50% yaitu indikator kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dan indikator aset daerah yang dapat dimanfaatkan. Indikator yang belum memenuhi target sebesar 25% yaitu kinerja Badan Usaha Milik Daerah. Indikator yang belum diketahui realisasinya sebesar 25% yaitu indikator opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Bisma dan Susanto (2010), yakni penelitian tentang evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007. Penelitian ini menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan analisis kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dengan tingkat kemandirian 54,58%, tingkat ketergantungan 77,93%, dan tingkat efisiensi belanja daerah sebesar 109,93% atau tidak efisien.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Publik diharapkan dapat menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dengan membandingkan kinerja keuangan yang direncanakan dengan yang dicapai. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan kebutuhan informasi dari laporan keuangan yang hanya menyajikan informasi bersifat historis.
2. Ketidakmampuan pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan.
3. Tidak semua jenis rasio keuangan dapat diaplikasikan untuk sektor publik karena tidak tersedianya informasi.
4. Laporan keuangan belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.
5. Laporan keuangan pemerintah daerah masih kurang transparan dan akuntabel.
6. Kinerja keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun terutama di pemerintahan kabupaten/kota.
7. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada sumber data dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2012-2014 yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Proksi pengukuran kinerja keuangan menggunakan perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Keserasian Belanja, sedangkan proksi pada pengukuran kemampuan keuangan menggunakan perhitungan *Share and Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Efektivitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Aktivitas?

5. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Keserasian Belanja?
6. Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan *Share and Growth* APBD?
7. Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Peta Kemampuan Keuangan Daerah?
8. Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengukur kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Kemandirian.

2. Mengukur kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.
3. Mengukur kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Efektivitas.
4. Mengukur kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Aktivitas.
5. Mengukur kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Keserasian Belanja.
6. Menilai kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan *Share and Growth* APBD.

7. Menilai kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Peta Kemampuan Keuangan Daerah.
8. Menilai kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi kinerja dan kemampuan keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana transparansi bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dana publik.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang manajemen pemerintahan dan dapat digunakan sebagai referensi bahan kepustakaan dalam perluasan penelitian yang sejenis.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, informasi dan referensi, serta tambahan wawasan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian

Menurut Sijabat (2013) kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Sumarjo (2010) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah luaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Syamsi (1986) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002).

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ulum (2009), antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja, serta membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi

yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Menurut Halim (2007), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian

Menurut Darminto (2011), laporan keuangan merupakan objek dari analisis terhadap laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, kreditor atau pemberi pinjaman, pemasok, kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan dan masyarakat, dan para pemegang saham. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Salah satu alat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi analisis keuangan daerah adalah laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2010) Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit kerja di dalamnya.

Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009 adalah:

- 1) Neraca atau Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- 2) Laporan laba rugi komprehensif.
- 3) Laporan perubahan ekuitas.
- 4) Laporan arus kas.
- 5) Catatan atas laporan keuangan.

- 6) Laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen pokok laporan keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

- 2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

- 3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

- 4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

b. Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen laporan keuangan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Komponen yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran meliputi:

- a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara atau kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah, dan tidak perlu dibayar kembali pembayarannya oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih akibat transaksi masa lalu.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara atau kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja daerah dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih akibat transaksi masa lalu.

c) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Neraca

Komponen yang dicakup secara langsung oleh neraca meliputi:

a) *Asset* adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam *asset* adalah potensi *asset* tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, baik kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. *Asset* diklasifikasikan ke dalam *asset* lancar jika diharapkan dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. *Asset* yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai *asset* nonlancar. *Asset* lancar meliputi kas dan setara kas, piutang dan persediaan. *Asset* nonlancar meliputi *asset* keuangan yang bersifat jangka panjang, *asset* yang digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah dan *asset* tidak berwujud. *Asset* nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi permanen, *asset* tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. *Asset* nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai *asset* lainnya, termasuk dalam *asset* lainnya antara lain adalah *asset* tidak berwujud dan dana cadangan.

- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintahan. Karakteristik kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban di dalam konteks pemerintahan, muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan pegawai yang bekerja pada pemerintahan atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum atau sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

- c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara *asset* dan kewajiban

pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari: Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara *asset* lancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka pendek; Ekuitas Dana Investasi, yaitu selisih antara *asset* nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang; dan Ekuitas Dana Cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Laporan Arus Kas

Komponen yang dicakup secara langsung oleh Laporan Arus Kas meliputi:

- a) Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum negara atau kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- b) Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum negara atau kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN atau Perda APBD.

- b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
- c) Mengajukan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos *asset* dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual yang dimodifikasi atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

c. Peranan Pelaporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,

belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan. Suatu entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

4) Keseimbangan Antargenerasi

Membantu mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

d. Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan pemanfaatan bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

3. Persamaan dan Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Komersial

a. Persamaan

Prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor

komersial. Akuntansi Manajemen sektor publik dan sektor pemerintah juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan tepat waktu. Secara umum, periode siklus akuntansi yang digunakan juga sama yaitu periode 1 Januari–31 Desember. Kedua sektor ini memakai istilah-istilah yang sama, misalnya buku harian, buku besar, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Akuntansi manajemen juga digunakan sebagai alat pengendalian baik bagi sektor komersial maupun pemerintah. Siklus akuntansi baik sektor publik maupun sektor komersial juga memiliki kesamaan, namun terdapat jurnal tambahan pada akuntansi publik yaitu jurnal korolari. Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-rekening neraca yang timbul akibat transaksi rekening-rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jurnal tersebut dibuat untuk merubah basis *cash* menjadi basis *accrual* sehingga hasil realisasi anggaran dapat merubah posisi keuangan pada neraca.

Berikut merupakan beberapa persamaan antara sektor publik dan sektor komersial (Renyowijoyo, 2010):

- 1) Keduanya merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*), sehingga harus

menggunakannya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

- 3) Pengendalian manajemen yang sama, yaitu perencanaan dan pengendalian pertanggungjawaban.
- 4) Menghasilkan produk yang sama berupa transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya.
- 5) Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan.

Beberapa persamaan antara sektor publik dan sektor komersial terkait laporan keuangan antara lain (Renyowijoyo, 2010):

- 1) Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
- 2) Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
- 3) Keduanya merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumberdaya yang langka untuk mencapai tujuan.
- 4) Keduanya harus menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna.
- 5) Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola organisasi.

- 6) Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi.
- 7) Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

b. Perbedaan

Beberapa perbedaan yang dapat dilihat antara akuntansi manajemen sektor komersial dengan pemerintah adalah:

- 1) Akuntansi manajemen sektor komersial lebih fokus pada pengoptimalan penggunaan sumber daya, sedangkan akuntansi manajemen sektor pemerintah lebih fokus kepada pemberian informasi biaya. Hal tersebut menyebabkan perhitungan biaya pada akuntansi manajemen sektor pemerintah kurang mempertimbangkan perhitungan biaya dan manfaat, sehingga seringkali terjadi ketidakefektifan penggunaan anggaran dan kurang maksimalnya pelaksanaan prinsip 3E (ekonomis, efisien, dan efektif).
- 2) Terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian biaya. Akuntansi manajemen sektor komersial membagi biaya ke dalam biaya langsung dan tidak langsung, serta ke dalam biaya tetap dan variabel. Akuntansi manajemen sektor pemerintah membagi biaya menurut peraturan perundangan, fungsi, dan jenis belanja.

- 3) Terdapat perbedaan standar yang digunakan untuk menetapkan jenis biaya. Penentuan standar biaya yang umum dilakukan pada sektor komersial adalah dengan didasarkan pada *Generally Accepted Accounting Principles* (Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum), sedangkan penentuan pada sektor pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Akuntansi manajemen sektor publik dan sektor komersial memiliki lingkup yang berbeda, sehingga memiliki perbedaan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Komersial

No.	Perbedaan	Sektor Publik/Pemerintahan	Sektor Swasta/Komersial
1.	Tujuan Organisasi	<i>Nonprofit motive</i>	<i>Profit motive</i>
2.	Sumber Pendanaan	Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/ BUMD, Penjualan aset Negara, dan sebagainya; Sumbangan, Hibah.	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan Eksternal: Utang Bank, Obligasi, penerbitan saham.
3.	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat dan parlemen (DPR/DPRD).	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
4.	Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hirarkis.	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dan sebagainya.
5.	Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik.	Tertutup untuk publik.
6.	Sistem akuntansi	Basis Kas	Basis Akrua

Sumber : (Mardiasmo, 2002)

Berikut penjelasan dari masing-masing unsur perbedaan:

a) Tujuan Organisasi

Tujuan sektor komersial adalah memaksimalkan laba untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Alat pengendalian organisasi sektor komersial lebih banyak bertumpu pada mekanisme organisasi karena berorientasi pada perolehan laba. Tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, tetapi memberi pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya.

Alat pengendalian sektor publik berupa peraturan birokrasi, yaitu terkait pengukuran kinerja, pencegahan KKN, dan pemantauan penyerapan anggaran karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta ada pengaruh politik. Pemerintah juga mempunyai badan usaha (BUMN dan BUMD) yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan untuk mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum.

b) Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pada sektor publik berasal dari pemerintahan seperti pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang sah, dan pinjaman nonpemerintahan seperti sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya. Sumber pendanaan pada sektor komersial lebih fleksibel, yaitu dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru.

c) Pertanggungjawaban

Sektor publik menguasai dana publik dan bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR/DPRD terkait kegiatan organisasi pemerintahan, dan bertanggung jawab langsung kepada masyarakat yang terkait kegiatan nonpemerintahan. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban kepada atasannya dalam struktur organisasi, sedang pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat umum, melalui mekanisme yang ada yaitu parlemen. Sektor komersial menguasai dana pemilik

dan bertanggung jawab kepada para pemilik yaitu pemegang saham dan kreditor.

d) Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada sektor komersial lebih fleksibel, datar, piramid, fungsional, dan sebagainya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dan permintaan konsumen. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, hirarkis, dan dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat kompleks. Organisasi pemerintah juga mempunyai fungsi yang lebih luas, meliputi pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, kebijakan fiskal dan moneter, regulasi sektor swasta, stabilisasi politik dan ekonomi, perlindungan sumber daya alam dan sosial, penegakan hukum dan perlindungan HAM, pemberian barang dan pelayanan, serta distribusi pendapatan dan kekayaan.

e) Karakteristik Anggaran

Anggaran sangat penting bagi pemerintahan sebagai otorisasi pelaksanaan, alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintahan, dan sebagai pertanggungjawaban. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang setelah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sementara anggaran untuk organisasi bisnis sangat fleksibel karena disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan serta ekonomi yang terjadi.

f) Sistem akuntansi

Sesuai dengan peraturan perundangan yang baru, (misalnya UU RI nomor 1 tahun 2004) sistem akuntansinya masih diperbolehkan menggunakan basis kas khusus untuk pembuatan laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk pos-pos neraca seperti aset, utang, dan ekuitas menggunakan basis akrual, sampai saatnya keseluruhannya menggunakan basis akrual. Secara konsep, penggunaan basis kas pada sistem akuntansi sektor publik adalah untuk pengakuan pendapatan dan beban, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Penggunaan sistem akuntansi untuk sektor komersial adalah basis akrual baik untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal.

4. Analisis Laporan Keuangan

Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat permasalahan yang muncul bahwa tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan. Dengan demikian, perlu adanya analisis laporan keuangan untuk membantu mengatasi ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut.

Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. Menganalisis laporan keuangan diperlukan penguasaan terhadap cara menyusun laporan keuangan atau proses akuntansi; konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi; teknik analisis; segmen, dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik internasional maupun nasional.

Salah satu teknik untuk melakukan analisis laporan keuangan, yaitu dengan melakukan perhitungan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya.

Penyederhanaan ini berfungsi untuk menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian. Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan Rasio Keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2014. Analisis Rasio Keuangan digunakan untuk menghitung Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.

a. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sumarjo (2010), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah luaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Beberapa ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah dalam organisasi pemerintah, yaitu:

1) Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (Halim, 2012). Menurut Mahmudi (2010),

semakin tinggi angka rasio yang dihasilkan menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2001):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100$$

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah (Halim, 2001):

- a) Pola Hubungan Instruktif, yakni peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b) Pola Hubungan Konsultatif, yakni campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c) Pola Hubungan Partisipatif, yakni peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d) Pola Hubungan Delekatif, yakni campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kemampuan pemerintah daerah akan semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Tabel 2. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991) dalam (Bisma dan Susanto, 2010).

3) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Semakin tinggi rasio efektivitas, maka dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD (\%)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2010).

4) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah atau operasi berarti persentase belanja publik atau modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio aktivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

(Halim, 2007):

$$\text{Rasio Belanja Aparatur (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Rutin atau Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Publik (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan atau Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

5) Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menunjukkan sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Selain itu, rasio keserasian belanja juga menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Analisis keserasian belanja meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Belanja langsung dikategorikan sebagai biaya teknik jika dilihat dari sudut pandang sistem pengendalian manajemen sektor publik, sedangkan belanja tidak langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan.

Menurut Mahmudi (2010) analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak

langsung, sebab belanja langsung sangat memengaruhi kualitas *output* kegiatan. Rasio keserasian belanja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

b. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan suatu daerah merupakan kesesuaian dari capaian hasil kinerja keuangan dengan target yang telah direncanakan. Kemampuan daerah ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Analisis kemampuan keuangan daerah dalam penelitian ini dapat diukur melalui:

1) *Share and Growth*

Share and Growth menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengambil peran total belanja, juga dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Kondisi ideal ditunjukkan dengan besarnya nilai *share and growth* yang tinggi (Muhibtari, 2014).

Share dan *growth* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

(Halim, 2008):

$$Share (\%) = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

$$Growth PAD_t (\%) = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah periode t

PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah periode t-1

2) Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Peta kemampuan keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal, yang diklasifikasikan dari hasil perhitungan *share and growth* dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran (Muhibtari, 2014). Metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Peta kemampuan keuangan daerah dapat dianalisis menggunakan tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran (Bisma dan Susanto, 2010).

Tabel 4. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya kecil. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.

Sumber : (Bappenas, 2003)

Tabel 4. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

Lanjutan...

KUADRAN	KONDISI
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.

Sumber : (Bappenas, 2003)

3) Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks kemampuan keuangan menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah dengan menyusun tiga komponen yakni rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas, dan indeks peran (*share*). Penyusunan ke tiga komponen indeks tersebut harus ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang tinggi akan semakin baik (Muhibtari, 2014).

Indeks kemampuan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Bisma dan Susanto, 2010):

$$\text{Indeks X} = \frac{(\text{Nilai x Hasil Pengukuran}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}{(\text{Nilai x Kondisi Maksimum}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}$$

$$\text{IKK} = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan:

X_G = Indeks Pertumbuhan dari PAD

X_E = Indeks Elastisitas dari PAD Terhadap Belanja
Langsung

X_S = Indeks *Share* dari PAD terhadap APBD

Tabel 5. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00-0,33	Rendah
0.34-0,43	Sedang
0,44-1,00	Tinggi

Sumber: (Bappenas, 2003) dalam (Bisma dan Susanto, 2010).

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merupakan hal penting bagi peneliti karena dapat dijadikan sebagai referensi serta sebagai salah satu sumber data pendukung yang sesuai dengan topik penelitian yang telah dipilih. Peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian Bisma dan Susanto (2010), berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

Anggaran 2003-2007” menunjukkan variabel kinerja keuangan daerah yang secara umum menggambarkan kinerja tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hasil kinerja tersebut ditunjukkan oleh indikator ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah sangat kurang, Desentralisasi Fiskal yang cukup, Efektivitas pengelolaan APBD yang sangat efektif, namun pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien. Penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa variabel kemampuan keuangan daerah mengalami proporsi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang sangat kecil karena sumbangan Pendapatan Asli Daerah (*share*) terhadap total pendapatan daerah masih rendah, namun pertumbuhan (*growth*) Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi. Berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), objek penelitian ini diklasifikasikan mempunyai kemampuan keuangan tinggi yang tentunya sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah.

2. Penelitian Sijabat, Saleh, dan Wachid (2013), berjudul “Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah” menunjukkan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang secara umum menggambarkan *trend* positif setiap tahunnya karena dapat meningkatkan kinerjanya dan adanya efisiensi pada komponen belanja daerah. Penelitian tersebut secara umum menunjukkan variabel kemampuan keuangan daerah yang

optimal meskipun hasil persentasenya masih berada dalam kategori kurang mampu.

3. Penelitian Pramono (2014), berjudul “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” menunjukkan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang sudah baik pada aspek efektivitas dan efisiensi, sedangkan aspek kemandirian keuangan daerah dan keserasian belanja masih kurang dan perlu menjadi perhatian. Penelitian tersebut secara umum menunjukkan variabel kemampuan keuangan daerah yang baik pada aspek pertumbuhan yang positif dan kemampuan membayar kembali pinjaman.
4. Penelitian Kaeng dan Saerang (2015), berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon” menunjukkan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang cukup baik pada Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan kinerja belanja daerah yang mengalami peningkatan, namun indikator Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah masih sangat rendah. Penelitian tersebut secara umum menunjukkan variabel kemampuan keuangan daerah yang belum mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah berupa dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat.

C. Kerangka Pikir

1. Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan daerah merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan dalam pencapaian suatu target pelaksanaan kegiatan dalam bidang keuangan daerah untuk kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja keuangan ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat prestasi yang dicapai suatu daerah setelah menentukan target pencapaian. Target pencapaian tersebut dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan agar pemerintah daerah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah melakukan analisa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ukuran untuk menganalisis kinerja keuangan daerah yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Keserasian Belanja. Rasio Kemandirian mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kemampuan pemerintah daerah akan

semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik.

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal. Semakin besar persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah atau operasi berarti persentase belanja publik atau modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Idealnya, persentase belanja publik harus lebih besar dari persentase belanja aparatur karena berpengaruh pada kebermanfaatan dana yang dikeluarkan untuk masyarakat.

Rasio Keserasian Belanja menunjukkan sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya dan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat memengaruhi kualitas *output* kegiatan.

2. Kemampuan Keuangan

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal tersebut perlu dilakukan agar mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi dari masing-masing daerah. Anggaran biaya yang lebih banyak dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

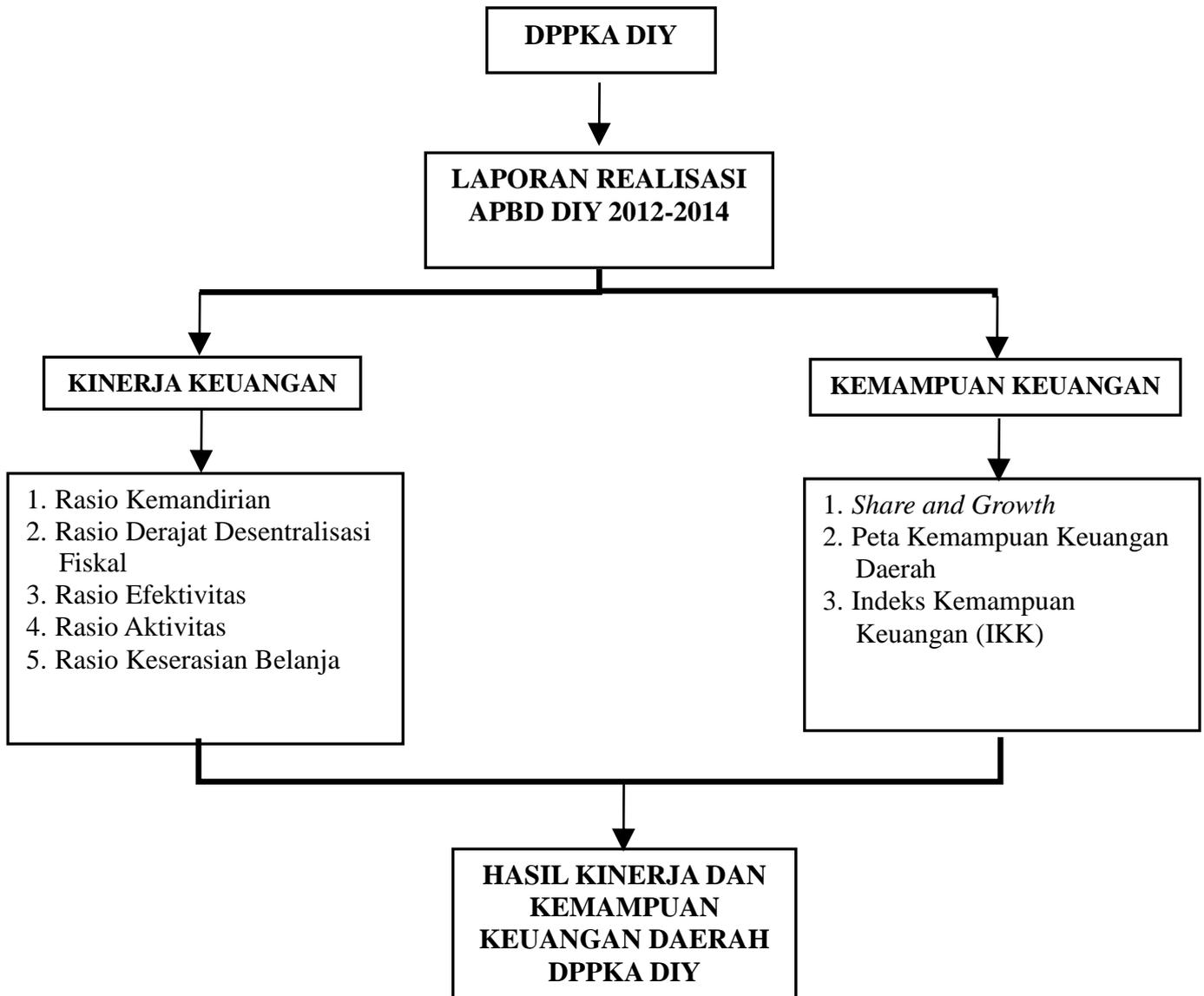
Setiap tahun Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas umum. Pembangunan tersebut pastilah berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Terlebih lagi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara transparan mengenai besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, serta pengaruhnya terhadap ukuran kinerja Pemerintah Daerah. Besar kecilnya rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun dapat dijadikan pembuktian apakah kinerja Pemerintah Daerah sudah sesuai atau belum, dengan dilihat dari perkembangan daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Salah satu alat untuk menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah melakukan analisa terhadap Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Ukuran untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah yaitu *Share* dan *Growth* Pendapatan Asli Daerah, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). *Share and Growth* menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengambil peran total belanja, dan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Kondisi ideal ditunjukkan dengan besarnya nilai *share and growth* yang tinggi.

Peta Kemampuan Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal, yang diklasifikasikan dari hasil perhitungan *share and growth* dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran yakni kuadran I, II, III, dan IV. Kondisi paling ideal ditunjukkan oleh Kuadran I. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah. Kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang tinggi akan semakin baik. Analisis rasio dari variabel kinerja dan kemampuan keuangan daerah tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur agar kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah yang berkembang.

D. Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

E. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan gambaran kerangka pemikiran di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Efektivitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Aktivitas?
5. Bagaimana kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Keserasian Belanja?

6. Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan *Share and Growth* APBD?
7. Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Peta Kemampuan Keuangan Daerah?
8. Bagaimanakah kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pada studi kasus terhadap evaluasi kinerja dan kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah itu, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial untuk menyimpulkan dan menganalisis hasil penelitian yang diperoleh.

“Studi kasus (*case study*) adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut” (Sukmadinata, 2015). Menurut Afrizal (2015), statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri dasar dari data hasil penelitian, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menyimpulkan sesuatu melebihi apa yang ditunjukkan data itu sendiri.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember 2015 sampai dengan Desember 2015.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Varibel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.

1. Variabel Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah luaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Sumarjo, 2010).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini adalah:

a. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (Halim, 2012). Menurut Mahmudi (2010), semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2001):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100$$

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (2010), Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kemampuan pemerintah daerah akan semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Semakin tinggi rasio efektivitas, maka dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD (\%)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja publik yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi

masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio aktivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2007):

$$\text{Rasio Belanja Aparatur (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Rutin atau Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Publik (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan atau Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

e. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menunjukkan sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, juga menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Menurut Mahmudi (2010) analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat memengaruhi kualitas *output* kegiatan. Rasio keserasian belanja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

2. Variabel Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan suatu daerah merupakan kesesuaian dari capaian hasil kinerja keuangan dengan target yang telah direncanakan.

Analisis kemampuan keuangan daerah dalam penelitian ini dapat diukur melalui:

a. *Share and Growth*

Share and Growth menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengambil peran total belanja, juga dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Kondisi ideal ditunjukkan dengan besarnya nilai *share and growth* yang tinggi (Muhibtari, 2014). *Share* dan *growth* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Bisma dan Susanto, 2010):

$$\text{Share } (\%) = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

$$\text{Growth PAD}_t (\%) = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah periode t

PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah periode t-1

b. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Peta kemampuan keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal, yang diklasifikasikan dari hasil perhitungan *share and growth* dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran (Muhibtari, 2014). Metode

kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Peta kemampuan keuangan daerah dapat dianalisis menggunakan tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran (Bisma dan Susanto, 2010).

c. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks kemampuan keuangan menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah dengan menyusun tiga komponen yakni rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas, dan indeks peran (*share*). Tambahan dari perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) adalah mencari indeks elastisitas. Indeks elastisitas merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung. Rasio ini bertujuan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.

Penyusunan ketiga komponen indeks tersebut harus ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang tinggi akan semakin baik (Muhibtari, 2014). Perhitungan indeks dari masing-masing komponen dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks X} = \frac{(\text{Nilai x Hasil Pengukuran}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}{(\text{Nilai x Kondisi Maksimum}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}$$

Indeks kemampuan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Bisma dan Susanto, 2010):

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan:

X_G = Indeks Pertumbuhan dari PAD

X_E = Indeks Elastisitas dari PAD Terhadap Belanja
Langsung

X_S = Indeks *Share* dari PAD terhadap APBD

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 2012-2014. Subjek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder berupa data laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2014. Data ini diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dipublikasikan di *website dppka.jogjaprov.go.id*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang memberikan data atau terlibat langsung dengan pihak yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang pada akhirnya akan menjadi data umum dalam pembuatan penelitian ini. Data yang diperoleh dari teknik wawancara ini adalah:

- a. Sejarah dan profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Visi dan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Struktur dan bagan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan perbendaharaan negara.

g. Sumber daya manusia Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian melalui sumber-sumber informasi berupa data dan dokumen. Hasil dari dokumentasi berupa laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012-2014.
- b. Neraca tahun 2012-2014.
- c. Laporan Arus Kas tahun 2012-2014.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2012-2014.

F. Tahapan Penelitian Studi Kasus

Tahapan penelitian studi kasus menurut Yin (2009) yaitu:

1. Mendefinisikan dan Merancang Penelitian

Peneliti melakukan kajian pengembangan teori atau konsep untuk menentukan kasus dan merancang protokol pengumpulan data pada tahap ini. Umumnya, pengembangan teori dan konsep digunakan untuk mengembangkan pertanyaan penelitian dan proposisi penelitian. Proposisi penelitian memiliki posisi yang mirip dengan hipotesis yaitu merupakan jawaban teoritis atas pertanyaan penelitian, namun proposisi lebih cenderung menggambarkan

prediksi konsep akhir yang akan dituju di dalam penelitian. Proposisi merupakan landasan bagi peneliti untuk menetapkan kasus apa umumnya dan unit analisis pada khususnya. Tahapan ini sama untuk penelitian studi kasus tunggal maupun jamak.

2. Menyiapkan, Mengumpulkan, dan Menganalisis Data

Peneliti melakukan persiapan, pengumpulan, dan analisis data berdasarkan protokol penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian pada studi kasus tunggal dilakukan pada kasus terpilih hingga dilanjutkan pada tahapan berikutnya, sedangkan pada penelitian studi kasus jamak, penelitian pada setiap kasus dilakukan masing-masing hingga menghasilkan laporan dari masing-masing kasus.

3. Menganalisis dan Menyimpulkan

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian studi kasus. Analisis dan penyimpulan dari hasil penelitian studi kasus tunggal digunakan untuk mengecek kembali kepada konsep atau teori yang telah dibangun pada tahap pertama penelitian. Sementara itu, pada penelitian studi kasus jamak, analisis dan penyimpulan dilakukan dengan mengkaji hasil-hasil penelitian dari setiap kasus. Seperti halnya pada penelitian studi kasus tunggal, hasil analisis dan penyimpulan digunakan untuk menetapkan atau memperbaiki konsep teori yang telah dibangun pada awal tahapan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menyimpulkan dan menganalisis hasil penelitian adalah statistik inferensial. Analisis inferensial mengacu pada pembuatan kesimpulan hasil analisis dari data menuju kondisi yang lebih general.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini antara lain:

1. Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel.
2. Membuat grafik untuk mengetahui laju pertumbuhan dari seluruh periode penelitian.
3. Menganalisis hasil rasio keuangan dari laporan keuangan.
4. Menginterpretasikan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis data yang digunakan untuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian

Langkah-langkah dalam menganalisis rasio kemandirian:

- 1) Membuat tabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.
- 2) Menghitung rasio kemandirian dengan menggunakan persamaan (Halim, 2011):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100$$

Tabel 6. Indikator Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipasif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2001) dalam Rahmatina (2011).

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Langkah-langkah dalam menganalisis rasio derajat desentralisasi fiskal:

- 1) Membuat tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total Pendapatan Daerah.
- 2) Menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

(Mahmudi, 2010)

Tabel 7. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma dan Susanto (2010).

c. Rasio Efektivitas

Langkah-langkah dalam menganalisis rasio efektivitas:

- 1) Membuat tabel realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Menghitung Rasio Efektivitas dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD (\%)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

(Mahmudi, 2010)

Tabel 8. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2010).

d. Rasio Aktivitas

Langkah-langkah dalam menganalisis rasio aktivitas:

- 1) Membuat tabel Total Belanja Rutin atau Operasi terhadap Total Belanja Daerah.
- 2) Membuat tabel Total Belanja Pembangunan atau Modal terhadap Total Belanja Daerah.
- 3) Menghitung rasio belanja aparatur dan belanja publik dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Rutin atau Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Publik (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan atau Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

(Halim, 2007)

e. Rasio Keserasian Belanja

Langkah-langkah dalam menganalisis rasio keserasian belanja:

1) Membuat tabel Total Belanja Langsung, Total Belanja Tidak Langsung, dan Total Belanja Daerah.

2) Menghitung Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung dengan persamaan:

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

(Mahmudi, 2010)

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

(Mahmudi, 2010)

2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

a. *Share and Growth*

Langkah-langkah dalam menganalisis *share* dan *growth*:

1) Membuat tabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja untuk menghitung *share*.

2) Membuat tabel Pendapatan Asli Daerah pada periode penelitian tertentu untuk menghitung *growth*.

3) Menghitung *Share* dan *Growth* dengan persamaan:

$$\text{Share (\%)} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

$$Growth\ PAD_t (\%) = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100$$

(Halim, 2008)

Keterangan:

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah periode tPAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah periode t-1

b. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Langkah-langkah dalam menganalisis peta kemampuan keuangan daerah:

- 1) Mengklasifikasikan hasil perhitungan *Share* dan *Growth* tersebut dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.
- 2) Mendeskripsikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.

Tabel 9. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.

Sumber : (Bappenas, 2003)

Tabel 9. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

Lanjutan...

KUADRAN	KONDISI
II	<p>Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga Pendapatan Asli Daerah berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) Pendapatan Asli Daerah tinggi.</p>
III	<p>Kondisi ini juga belum ideal. Peran Pendapatan Asli Daerah yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan Pendapatan Asli Daerahnya kecil. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rendah.</p>
IV	<p>Kondisi ini paling buruk. Peran Pendapatan Asli Daerah belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rendah.</p>

Sumber : (Bappenas, 2003)

c. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dapat dianalisis dengan cara menghitung indeks dari masing-masing komponen dengan persamaan:

$$\text{Indeks X} = \frac{(\text{Nilai x Hasil Pengukuran}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}{(\text{Nilai x Kondisi Maksimum}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}$$

(Bisma dan Susanto, 2010)

Berdasarkan persamaan di atas, maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{IKK} = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

(Bisma dan Susanto, 2010)

Keterangan:

X_G = Indeks Pertumbuhan dari PAD

X_E = Indeks Elastisitas dari PAD Terhadap Belanja Langsung

X_S = Indeks *Share* dari PAD terhadap APBD

Nilai Elastisitas dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Langsung}}$$

(Muhibtari, 2014)

Tabel 10. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00-0,33	Rendah
0.34-0,43	Sedang
0,44-1,00	Tinggi

Sumber: (Bappenas, 2003) dalam Bisma dan Susanto (2010).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kinerja dan kemampuan keuangan daerah dengan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012-2014 disajikan pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2014

No	Tahun	Komponen	Nilai (dalam Rupiah)
1.	2012	Dana Perimbangan	894.544.324.851,00
2.	2013	Dana Perimbangan	957.561.850.914,00
3.	2014	Dana Perimbangan	1.013.811.389.590,00
4.	2012	Pendapatan Asli Daerah	1.004.063.125.812,33
5.	2013	Pendapatan Asli Daerah	1.216.102.749.617,01
6.	2014	Pendapatan Asli Daerah	1.464.604.954.200,16
7.	2012	Total Pendapatan Daerah	2.171.734.307.663,33
8.	2013	Total Pendapatan Daerah	2.583.056.763.524,01
9.	2014	Total Pendapatan Daerah	3.139.871.880.417,16
10.	2012	Total Belanja Rutin/Operasi	1.521.924.861.484,00
11.	2013	Total Belanja Rutin/Operasi	1.640.519.809.958,57
12.	2014	Total Belanja Rutin/Operasi	1.942.797.509.932,94
13.	2012	Total Belanja Daerah Publik	1.739.517.404.467,00
14.	2013	Total Belanja Daerah Publik	2.009.915.603.997,57
15.	2014	Total Belanja Daerah Publik	2.387.197.918.533,94
16.	2012	Total Belanja Pembangunan/Modal	216.419.982.440,00
17.	2013	Total Belanja Pembangunan/Modal	369.395.794.039,00
18.	2014	Total Belanja Pembangunan/Modal	442.446.473.601,00
19.	2012	Total Belanja Langsung	814.711.583.972,00
20.	2013	Total Belanja Langsung	1.069.181.078.251,57

Sumber: Data APBD DIY Tahun 2012-2014 diolah

Tabel 11. APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2014

Lanjutan...

No	Tahun	Komponen	Nilai (dalam Rupiah)
21.	2014	Total Belanja Langsung	1.420.910.964.598,94
22.	2012	Total Belanja Langsung Daerah	2.053.825.959.467,00
23.	2013	Total Belanja Langsung Daerah	2.509.643.375.218,35
24.	2014	Total Belanja Langsung Daerah	2.981.068.320.421,41
25.	2012	Total Belanja Tidak Langsung	1.239.114.375.495,00
26.	2013	Total Belanja Tidak Langsung	1.440.462.296.966,78
27.	2014	Total Belanja Tidak Langsung	1.560.157.355.822,47
28.	2012	Total Belanja Tidak Langsung Daerah	2.053.825.959.467,00
29.	2013	Total Belanja Tidak Langsung Daerah	2.509.643.375.218,35
30.	2014	Total Belanja Tidak Langsung Daerah	2.981.068.320.421,41

Sumber: Data APBD DIY Tahun 2012-2014 diolah

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2012-2014 Dana Perimbangan mengalami peningkatan, dimana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah total mencapai Rp1.013.811.389.590,00. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah total mencapai Rp1.464.604.954.200,16. Total Pendapatan Daerah mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah total mencapai Rp3.139.871.880.417,16.

Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berupa Total Belanja Rutin atau Belanja Operasi mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah total mencapai Rp1.942.797.509.932,94. Total Belanja Daerah Publik mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp2.387.197.918.533,94. Total

Belanja Pembangunan atau Belanja Modal mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah total mencapai Rp442.446.473.601,00.

Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berupa Total Belanja Langsung mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut. Peningkatan tertinggi dari Total Belanja Langsung terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah total mencapai Rp1.420.910.964.598,94. Total Belanja Langsung Daerah mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut. Peningkatan tertinggi dari Total Belanja Langsung Daerah terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah total mencapai Rp2.981.068.320.421,41. Total Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah total mencapai Rp1.560.157.355.822,47. Total Belanja Tidak Langsung Daerah juga mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut. Peningkatan Total Belanja Tidak Langsung Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah total mencapai Rp2.981.068.320.421,41.

B. Hasil Penelitian

Data yang digunakan untuk menghitung Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2014 yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah data sekunder. Proksi pengukuran kinerja keuangan menggunakan perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan

Rasio Keserasian Belanja, sedangkan proksi pada pengukuran kemampuan keuangan menggunakan perhitungan *Share and Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah dipublikasikan di *website dppka.jogjaprov.go.id* dengan menganalisis data dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu tahun 2012-2014.

1. Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengukuran kinerja keuangan menggunakan perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Keserasian Belanja selama tahun 2012 sampai 2014 disajikan sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) adalah rasio yang mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (Halim, 2012). Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Kemandirian dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100$$

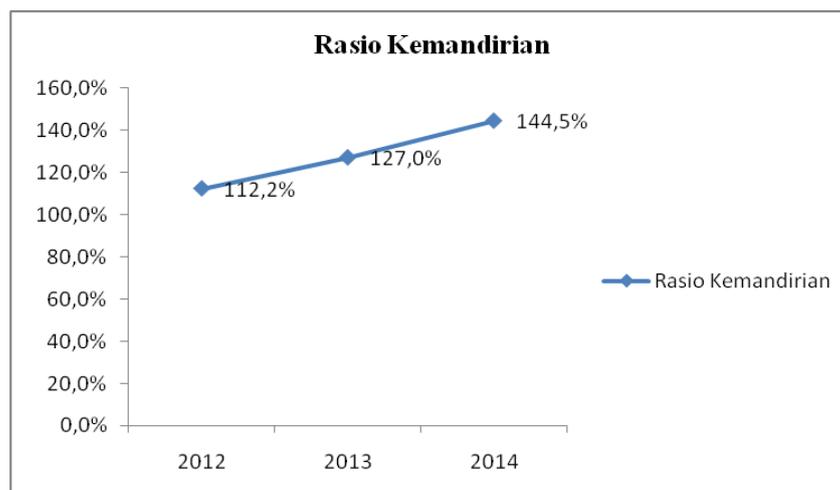
Hasil perhitungan rasio kemandirian disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Rasio Kemandirian APBD DIY Anggaran Tahun 2012-2014

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2012	1.004.063.125.812,33	894.544.324.851,00	112,2%	Delegatif
2013	1.216.102.749.617,01	957.561.850.914,00	127,0%	Delegatif
2014	1.464.604.954.200,16	1.013.811.389.590,00	144,5%	Delegatif
Mean			127,9%	

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Berdasarkan tabel 12, data Rasio Kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Anggaran Tahun 2012-2014 dapat disajikan pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Rasio Kemandirian APBD DIY Anggaran Tahun 2012-2014

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 12 dan gambar 2, Rasio Kemandirian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp1.004.063.125.812,33 dan

Dana Perimbangan sebesar Rp894.544.324.851,00, sehingga Rasio Kemandirian adalah sebesar 112,2%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp1.216.102.749.617,01 dan Dana Perimbangan sebesar Rp957.561.850.914,00 sehingga Rasio Kemandirian adalah sebesar 127,0%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar Rp1.464.604.954.200,16 dan Dana Perimbangan sebesar Rp1.013.811.389.590,00, sehingga Rasio Kemandirian adalah sebesar 144,5%. Rata-rata Rasio Kemandirian provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 3 tahun adalah sebesar 127,9%. Berdasarkan hasil persentase tersebut, menurut kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah yang dituliskan oleh Halim (2001), Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan tinggi, sehingga masuk ke dalam kategori pola hubungan delegatif, dimana pola hubungan tersebut memiliki kriteria penilaian berkisar antara 75%-100% atau lebih.

Berdasarkan pola hubungan delegatif, peran pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan

merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tabel 12 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini berarti Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah optimal dalam menggali potensi daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sudah tinggi. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, serta menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga ikut meningkat. Pendapatan Asli Daerah pun juga ikut meningkat, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Perhitungan tingkat kemandirian keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta berguna untuk melihat kemampuan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakatnya. Hal ini sangat

penting untuk diketahui mengingat seluruh dana yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, dan pungutan lainnya yang sudah diatur dalam peraturan daerah. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kemandirian keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat menunjukkan apakah suatu daerah memiliki ketergantungan yang besar terhadap pihak eksternal atau tidak, hal ini bisa ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan suatu daerah akan menunjukkan semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap dana yang berasal dari luar daerah tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang sudah maju, dan Pendapatan Asli Daerah sudah mampu membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya sehingga bantuan dari Pemerintah Pusat kecil. Meskipun demikian, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap harus mampu untuk lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan alternatif mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki potensi-potensi sumber daya yang masih belum dikelola dengan maksimal seperti potensi kekayaan laut, potensi wisata bahari, jasa bongkar muat, angkutan, pertanian, dan usaha-usaha jasa lainnya. Untuk itu, diperlukan perbaikan dari berbagai aspek seperti peraturan daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan tata kelola organisasi sebagai upaya untuk

meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal disajikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

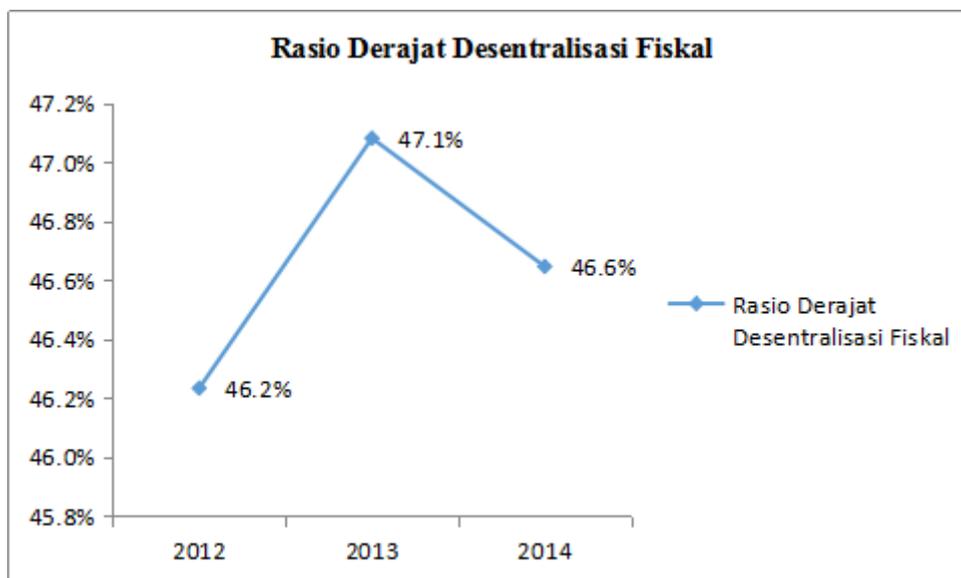
Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
2012	1.004.063.125.812,33	2.171.734.307.663,33	46,2%	Baik
2013	1.216.102.749.617,01	2.583.056.763.524,01	47,1%	Baik
2014	1.464.604.954.200,16	3.139.871.880.417,16	46,6%	Baik
Mean			46,7%	Baik

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Berdasarkan tabel 13 data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Anggaran Tahun 2012-2014 dapat disajikan pada gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD DIY Tahun Anggaran 2010-2014

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 13 dan gambar 3, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2012 sebesar 46,2%, kemudian pada tahun 2013 naik sebesar 47,1%, namun di tahun 2014 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal turun menjadi 46,6%.

Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp1.004.063.125.812,33 dan Total Pendapatan Daerah Rp2.171.734.307.663,33, sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebesar 46,2%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp1.216.102.749.617,01 dan Total Pendapatan Daerah Rp2.583.056.763.524,01, sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebesar 47,1%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar Rp1.464.604.954.200,16 dan Total Pendapatan Daerah Rp3.139.871.880.417,16, sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebesar 46,6%. Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2012-2014 adalah sebesar 46,7%.

Hasil persentase tersebut, menurut Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dikatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung besar. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap periodenya menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat tergolong kecil. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam menopang pendapatan daerah, serta peran Pendapatan Asli Daerah atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri lebih dari 40%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi sudah baik.

Derajat desentralisasi fiskal yang baik secara langsung dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah yang besar. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki agar dapat mempertahankan desentralisasi fiskal dalam kategori baik. Inovasi dan kreatifitas daerah sangat diperlukan, sehingga komponen pendapatan asli daerah yang menjadi konsentrasi pemerintah daerah tidak hanya bersumber dari pajak dan retribusi saja. Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga sumber pendapatan daerah dapat bervariasi.

Selain itu, pemerintah pusat harus membenahi kebijakan tentang dana bagi hasil. Pandangan yang didapatkan dari penelitian ini adalah jika pengelolaan dana bagi hasil masih dipegang oleh pemerintah pusat dan daerah hanya diberi proporsi yang kecil, maka daerah tidak akan memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi. Pemerintah pusat tentunya juga harus lebih mempertegas fungsi pengawasan dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga pajak dan retribusi daerah bisa kembali ke fungsinya yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan, bukan hanya memberatkan rakyat.

c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diprosikan dengan perhitungan Rasio Efektivitas dengan rumus sebagai berikut:

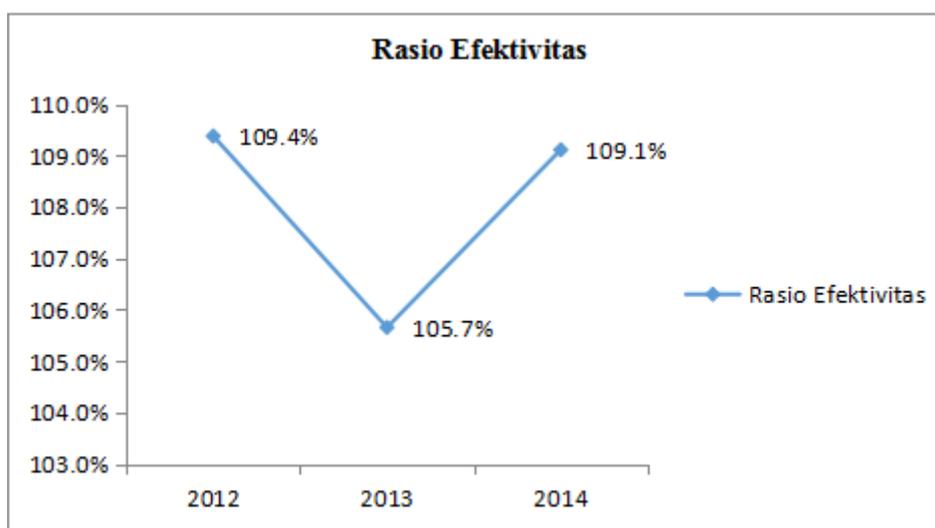
$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (\%)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 14. Rasio Efektivitas APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2012	1.004.063.125.812,33	917.957.788.795,00	109,4%	Sangat Efektif
2013	1.216.102.749.617,01	1.151.006.344.797,00	105,7%	Sangat Efektif
2014	1.464.604.954.200,16	1.342.290.475.580,27	109,1%	Sangat Efektif
Mean			108,0%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Berdasarkan tabel 14, data Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2014 dapat disajikan pada gambar 4 berikut ini:



Gambar 4. Rasio Efektivitas APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 14 dan gambar 4, Rasio Efektivitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi. Rasio Efektivitas pada tahun 2012 sebesar 109,4%, kemudian di

tahun berikutnya yaitu tahun 2013, Rasio Efektivitas turun sebesar 105,7%, dan pada tahun 2014 Rasio Efektivitas mengalami kenaikan kembali sebesar 109,1%.

Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2012 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.004.063.125.812,33 dan Target Penerimaan berdasarkan Potensi Riil Daerah Rp917.957.788.795,00, sehingga Rasio Efektivitas adalah sebesar 109,4%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp1.216.102.749.617,01 dan Target Penerimaan berdasarkan Potensi Riil Daerah Rp1.151.006.344.797,00, sehingga Rasio Efektivitas adalah sebesar 105,7%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar Rp1.464.604.954.200,16 dan Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Riil Daerah Rp1.342.290.475.580,27, sehingga Rasio Efektivitas adalah sebesar 109,1%. Berdasarkan data secara keseluruhan pada semua periode tingkat efektivitasnya dikatakan sangat baik. Rata-rata Rasio Efektivitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 3 tahun sebesar 108,0%. Menurut kriteria Rasio Efektivitas, tingkat efektivitas Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah yang semakin baik.

Tingkat efektivitas Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kategori sangat efektif menunjukkan kinerja yang positif bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan. Kemampuan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meraup Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan menandakan di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki banyak sumber Pendapatan Asli Daerah yang apabila bisa dioptimalkan dengan baik dapat membantu tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang ada apabila didukung oleh kinerja pemerintah daerah.

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007). Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Aktivitas yang terdiri dari Rasio Belanja Aparatur dan Rasio Belanja Publik disajikan sebagai berikut:

1) Rasio Belanja Aparatur

Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diprosikan dengan perhitungan Rasio Aktivitas berdasarkan Rasio Belanja Aparatur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Perjalanan, dan Belanja Pemeliharaan.

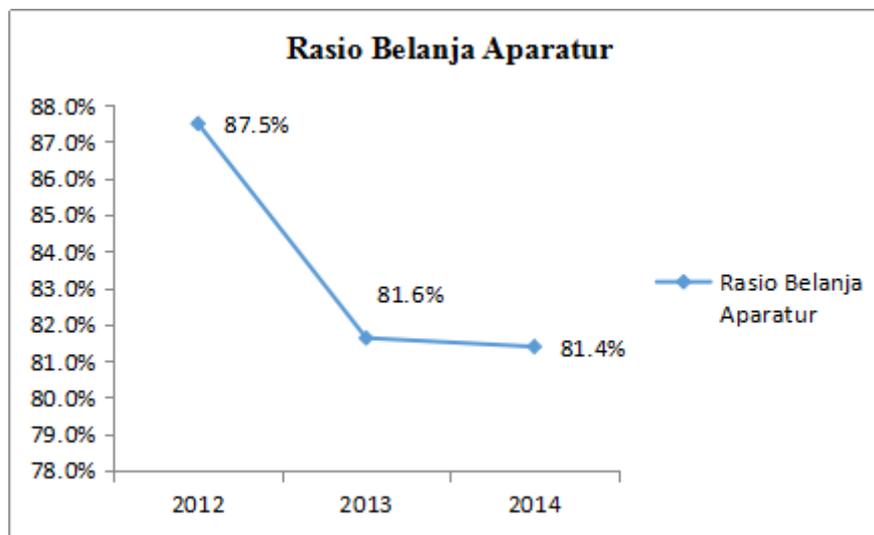
Tabel 15. Rasio Belanja Aparatur APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Aparatur
2012	1.521.924.861.484,00	1.739.517.404.467,00	87,5%
2013	1.640.519.809.958,57	2.009.915.603.997,57	81,6%
2014	1.942.797.509.932,94	2.387.197.918.533,94	81,4%
Mean			83,5%

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Berdasarkan tabel 15, data Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2014 dapat disajikan pada gambar 5 berikut ini:



Gambar 5. Rasio Belanja Aparatur APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 15 dan gambar 5, Rasio Belanja Aparatur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan. Rasio Belanja Aparatur pada tahun 2012 sebesar 87,5%, selanjutnya Rasio Belanja Aparatur pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 81,6% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 81,4%.

Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2012 Total Belanja Operasi Rp1.521.924.861.484,00 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp1.739.517.404.467,00, sehingga Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah sebesar

87,5%. Total Belanja Operasi pada tahun 2013 sebesar Rp1.640.519.809.958,57 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp2.009.915.603.997,57, sehingga Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 81,6%. Total Belanja Operasi pada tahun 2014 sebesar Rp1.942.797.509.932,94 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp2.387.197.918.533,94, sehingga Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 81,4%.

Rata-rata Rasio Belanja Aparatur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 3 tahun sebesar 83,5% dalam kategori tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Aparatur dibandingkan untuk Belanja Publik artinya kebermanfaatan dana yang dikeluarkan untuk masyarakat masih kurang.

2) Rasio Belanja Publik

Belanja Publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diprosikan dengan perhitungan Rasio Aktivitas berdasarkan Rasio Belanja Publik dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Publik (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

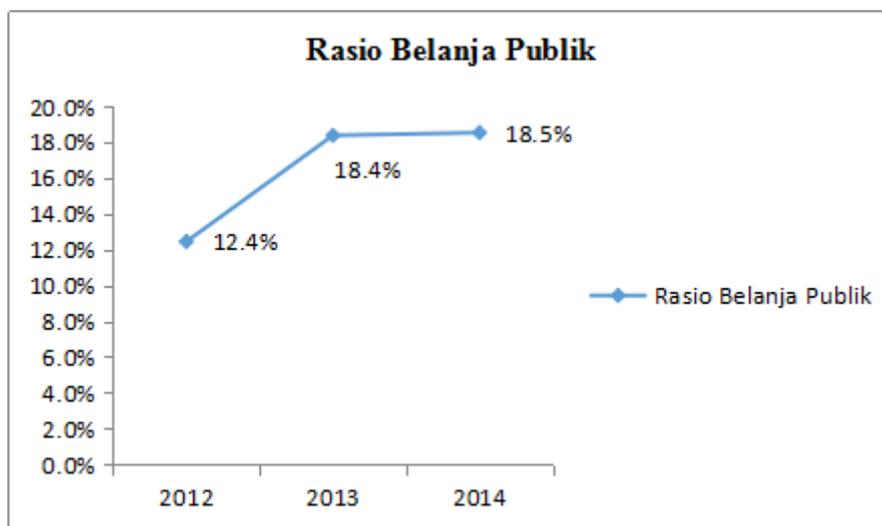
Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Hasil perhitungan Rasio Belanja Publik disajikan sebagai berikut:

Tabel 16. Rasio Belanja Publik APBD DIY Anggaran Tahun 2012-2014

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Publik
2012	216.419.982.440,00	1.739.517.404.467,00	12,4%
2013	369.395.794.039,00	2.009.915.603.997,57	18,4%
2014	442.446.473.601,00	2.387.197.918.533,94	18,5%
Mean			16,5%

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Berdasarkan tabel 16, data Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2014 dapat disajikan pada gambar 6 berikut ini:



Gambar 6. Rasio Belanja Publik APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 16 dan gambar 6, Rasio Belanja Publik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Rasio Belanja Publik pada tahun 2012 sebesar 12,4%, selanjutnya rasio belanja publik pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 18,4% dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dengan jumlah total sebesar 18,5%.

Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa tahun 2012 Total Belanja Modal Rp216.419.982.440,00 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp1.739.517.404.467,00, sehingga Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah sebesar 12,4%. Total Belanja Modal pada tahun 2013 sebesar Rp369.395.794.039,00 dan Total Belanja Daerah sebesar

Rp2.009.915.603.997,57, sehingga Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah sebesar 18,4%. Total Belanja Modal pada tahun 2014 Rp442.446.473.601,00 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp2.387.197.918.533,94, sehingga Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah sebesar 18,5%.

Rata-rata Rasio Belanja Publik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 3 tahun sebesar 16,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Publik, padahal dana dari belanja publik digunakan untuk kepentingan masyarakat yang meliputi tiga bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

e. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menunjukkan sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Selain itu, rasio keserasian belanja juga menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diprosikan dengan perhitungan Rasio Keserasian Belanja yang terdiri dari Rasio Belanja Langsung

dan Rasio Belanja Tidak Langsung disajikan sebagai berikut:

1) Rasio Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diprosikan dengan perhitungan Rasio Keserasian Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

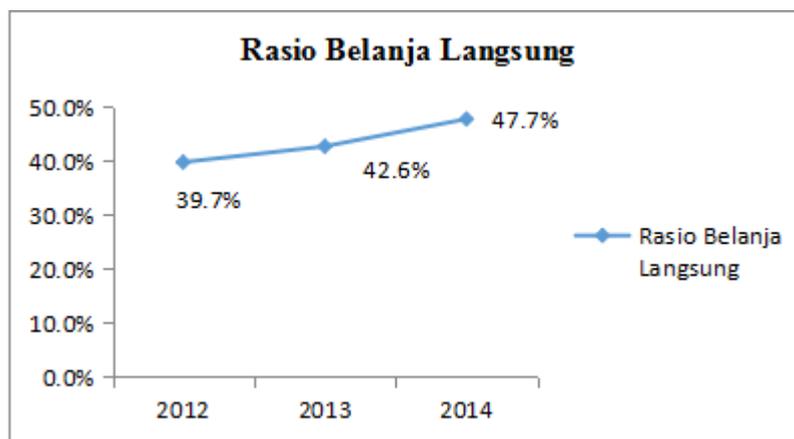
$$\text{Rasio Belanja Langsung (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Tabel 17. Rasio Belanja Langsung APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Total Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Langsung
2012	814.711.583.972,00	2.053.825.959.467,00	39,7%
2013	1.069.181.078.251,57	2.509.643.375.218,35	42,6%
2014	1.420.910.964.598,94	2.981.068.320.421,41	47,7%
Mean			43,3%

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Berdasarkan tabel 17, data Rasio Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2014 dapat disajikan pada gambar 7 berikut ini:



Gambar 7. Rasio Belanja Langsung APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 17 dan gambar 7 di atas, Rasio Belanja Langsung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Rasio Belanja Langsung pada tahun 2012 sebesar 39,7%, kemudian tahun 2013 mengalami kenaikan dengan jumlah total sebesar 42,6% dan tahun 2014 mengalami kenaikan dengan jumlah total sebesar 47,7%.

Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa Total Belanja Langsung pada tahun 2012 sebesar Rp814.711.583.972,00 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp2.053.825.959.467,00, sehingga Rasio Belanja Langsung adalah sebesar 39,7%. Total Belanja Langsung pada tahun 2013 sebesar Rp1.069.181.078.251,57 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp2.509.643.375.218,35, sehingga Rasio Belanja Langsung adalah sebesar 42,6%. Total Belanja Langsung pada tahun 2014 sebesar Rp1.420.910.964.598,94 dan

Total Belanja Daerah sebesar Rp2.981.068.320.421,41, sehingga Rasio Total Belanja Langsung adalah sebesar 47,7%.

Rata-rata Rasio Belanja Langsung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 3 tahun sebesar 43,3%. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung seperti: belanja operasional kantor dan belanja modal seperti pembangunan di sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.

2) Rasio Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diprosikan dengan perhitungan Rasio Keserasian Belanja berdasarkan Rasio Belanja Tidak Langsung dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

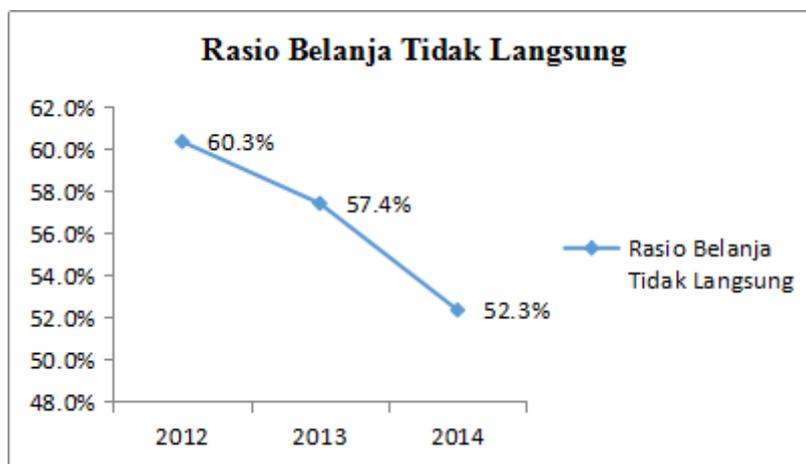
$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung (\%)} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Tabel 18. Rasio Belanja Tidak Langsung APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Total Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Tidak Langsung
2012	1.239.114.375.495,00	2.053.825.959.467,00	60,3%
2013	1.440.462.296.966,78	2.509.643.375.218,35	57,4%
2014	1.560.157.355.822,47	2.981.068.320.421,41	52,3%
Mean			56,7%

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Berdasarkan tabel 18, data Rasio Belanja Tidak Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012-2014 dapat disajikan pada gambar 8 berikut ini:



Gambar 8. Rasio Belanja Tidak Langsung APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 18 dan gambar 8, Rasio Belanja Tidak Langsung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan. Rasio Belanja Tidak Langsung pada tahun

2012 sebesar 60,3%, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 57,4% dan tahun 2014 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 52,3%.

Data tersebut secara rinci menunjukkan bahwa Total Belanja Tidak Langsung pada tahun 2012 sebesar Rp1.239.114.375.495,00 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp2.053.825.959.467,00, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 60,3%. Total Belanja Tidak Langsung pada tahun 2013 sebesar Rp1.440.462.296.966,78 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp2.509.643.375.218,35, sehingga Rasio Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 57,4%. Total Belanja Tidak Langsung pada tahun 2014 sebesar Rp1.560.157.355.822,47 dan Total Belanja Daerah sebesar Rp2.981.068.320.421,41, sehingga Rasio Total Belanja Tidak Langsung Biaya adalah sebesar 52,3%. Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 3 tahun sebesar 56,7%. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan untuk Belanja Langsung.

Berdasarkan perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Belanja Tidak

Langsung meliputi belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, karena belanja langsung sangat memengaruhi kualitas *output* kegiatan. Kedua rasio tersebut selisih 13,4%, berarti Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya bisa meningkatkan Belanja Langsung agar kualitas *outputnya* meningkat, dan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik.

2. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengukuran kemampuan keuangan daerah menggunakan perhitungan *Share and Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) selama tahun 2012 sampai 2014 disajikan sebagai berikut:

a. Perhitungan *Share and Growth*

Share and Growth menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengambil peran total belanja, juga dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran kemampuan

keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan *Share and Growth* disajikan sebagai berikut:

1) *Share*

Rasio *Share* merupakan perhitungan rasio yang dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan *share* dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Share (\%)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

Tabel 19. Perhitungan *Share* APBD DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio <i>Share</i>
2012	1.004.063.125.812,33	2.053.825.959.467,00	48,9%
2013	1.216.102.749.617,01	2.509.643.375.218,35	48,5%
2014	1.464.604.954.200,16	2.981.068.320.421,41	49,1%
Mean			48,8%

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

2) *Growth*

Rasio pertumbuhan (*growth*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan

maupun penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Pengukuran kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diprosikan dengan perhitungan *Growth* sebagai berikut:

$$Growth\ PAD_t (\%) = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100$$

Tabel 20. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	PAD _t (Rp)	PAD _{t-1} (Rp)	PAD _t -PAD _{t-1} (Rp)
2012	1.004.063.125.812,33	867.112.885.352,00	136.950.240.460,33
2013	1.216.102.749.617,01	1.004.063.125.812,33	212.039.623.804,68
2014	1.464.604.954.200,16	1.216.102.749.617,01	248.502.204.583,15

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Tabel 21. Perhitungan Rasio *Growth* Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	PAD _t -PAD _{t-1} (Rp)	PAD _{t-1} (Rp)	Rasio <i>Growth</i>
2012	136.950.240.460,33	867.112.885.352,00	15,8%
2013	212.039.623.804,68	1.004.063.125.812,33	21,1%
2014	248.502.204.583,15	1.216.102.749.617,01	20,4%
Mean			19,1%

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemampuan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 rata-rata nilai *share* sebesar 48,8% dan rata-rata nilai

growth sebesar 19,1%; hal ini menunjukkan bahwa nilai *share* dan nilai *growth* tergolong tinggi.

Nilai *share* sebesar 48,8% termasuk dalam kategori tinggi, hal ini berarti bahwa daerah memiliki kemampuan dalam membiayai belanja daerah, dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah mampu berperan dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai *growth* sebesar 19,1% tergolong besar karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang sudah maju. Selain itu, daerah dengan *growth* yang besar biasanya melakukan kebijakan peningkatan tarif pajak daerah. Peran serta pemerintah sangatlah penting dalam sebuah pertumbuhan daerahnya terutama pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, sebab pemerintah daerah yang memiliki hak untuk membuat peraturan hal apa saja yang bisa menjadi pajak daerah dalam sebuah peraturan daerah serta izin dari pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menambah sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Peta kemampuan keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal, yang diklasifikasikan dari hasil perhitungan *share and growth* dengan menggunakan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran (Muhibtari, 2014). Berdasarkan hasil perhitungan *Share* dan

Growth terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014, maka diperoleh data *Share* sebesar 48,8% dan *Growth* sebesar 19,1%. Hasil tersebut diklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, maka kemampuan keuangan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan tampak sebagaimana pada gambar di bawah ini.

***Share* sebesar 48,8%**
***Growth* sebesar 19,1%**

KUADRAN I <i>Share</i> : Tinggi <i>Growth</i> : Tinggi	KUADRAN II <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Tinggi
KUADRAN III <i>Share</i> : Tinggi <i>Growth</i> : Rendah	KUADRAN IV <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Rendah

Gambar 9. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Posisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada Kuadran I, yaitu menunjukkan sumbangan (*share*) Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tinggi dan pertumbuhan (*growth*) Pendapatan Asli Daerah juga tinggi. Posisi pada Kuadran I adalah kondisi ideal. Peran Pendapatan Asli Daerah yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang besar karena pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tersebut besar. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja yang tinggi, menunjukkan peran dari Pendapatan Asli Daerah yang

dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta sangat membantu kegiatan pemerintahan.

Posisi pada Kuadran I juga menggambarkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif lebih siap menghadapi era otonomi daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan sebagai daerah yang siap menghadapi otonomi dikarenakan kedudukannya yang lebih strategis (khususnya sebagai daerah wisata), pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai pajak yang diperkenankan dipungut. Hal ini didukung oleh destinasi wisata yang banyak diminati masyarakat. Banyaknya objek dan daya tarik wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan manca negara maupun wisatawan nusantara.

Bentuk wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus, dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti *resort*, hotel, dan restoran. Keanekaragaman upacara keagamaan, dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreativitas seni, dan keramah tamahan masyarakat, membuat Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menciptakan produk-produk budaya, dan pariwisata yang menjanjikan.

Secara geografis, Daerah Istimewa Yogyakarta juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi objek wisata yang terjangkau, dan mudah ditempuh. Sektor pariwisata sangat signifikan menjadi motor kegiatan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara umum bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: jasa, perdagangan, hotel, dan restoran, dan pertanian. Bidang pariwisata memberi efek pengganda (*multiplier effect*) yang nyata bagi sektor perdagangan, yang disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja, dan sumbangan terhadap perekonomian daerah sangat signifikan, oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan kinerjanya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah pada periode selanjutnya. Banyaknya potensi yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi yang diperoleh dari pembayaran pelayanan penjualan jasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pajak dan retribusi merupakan pemberi kontribusi utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. Perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks kemampuan keuangan menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah dengan menyusun tiga komponen yakni rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas, dan indeks peran (*share*). Penyusunan ke tiga komponen

indeks tersebut harus ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah yang tinggi akan semakin baik (Muhibtari, 2014). Perhitungan nilai indeks dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks X} = \frac{(\text{Nilai x Hasil Pengukuran}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}{(\text{Nilai x Kondisi Maksimum}) - (\text{Nilai x Kondisi Minimum})}$$

Indeks kemampuan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Bisma dan Susanto, 2010):

$$\text{IKK} = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan:

X_G = Indeks Pertumbuhan dari PAD

X_E = Indeks Elastisitas dari PAD terhadap
Belanja Langsung

X_S = Indeks *Share* dari PAD terhadap APBD

1) Indeks *Growth*

Perhitungan Indeks *Growth* memperlihatkan bagaimana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah perhitungan Indeks *Growth* Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014:

Tabel 22. Perhitungan Indeks *Growth* APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Kondisi Minimal (a)	Kondisi maksimal -Kondisi Minimal (b)	a/b (%)
2012	0	4.60542	0.000
2013	2.1204	4.60542	0.460
2014	4.60542	4.60542	1.000

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Tabel 23. Indeks *Growth* APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kondisi maksimal (Rp)	Kondisi Minimal (Rp)	Indeks (%)
2012	1.004.063.125.812,33	1.464.604.954.200,16	1.004.063.125.812,33	0,000
2013	1.216.102.749.617,01	1.464.604.954.200,16	1.004.063.125.812,33	0,460
2014	1.464.604.954.200,16	1.464.604.954.200,16	1.004.063.125.812,33	1,000
Jumlah				1,460

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

$$X_G = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{1,460}{3} = 0,4868$$

2) Indeks Elastisitas

Indeks Elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja langsung bertujuan untuk melihat elastisitas atau sensitivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah perhitungan Indeks Elastisitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Langsung}}$$

Tabel 24. Perhitungan Nilai Elastisitas APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Belanja Langsung (Rp)	Nilai (%)
2012	1,004,063,125,812.33	814,711,583,972.00	1.232415428
2013	1,216,102,749,617.01	1,069,181,078,251.57	1.137415144
2014	1,464,604,954,200.16	1,420,910,964,598.94	1.030750688

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Tabel 25. Perhitungan Indeks Elastisitas APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Nilai - Kondisi Minimal (a)	Kondisi maksimal -Kondisi Minimal (b)	a/b (%)
2012	0.20166474	0.20166474	1.000
2013	0.10666445	0.20166474	0.529
2014	0	0.20166474	0.000

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Tabel 26. Indeks Elastisitas APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Nilai (%)	Kondisi Maksimal (%)	Kondisi Minimal (%)	Indeks (%)
2012	1,232	1,232	1,03	1,000
2013	1,137	1,232	1,03	0,529
2014	1,030	1,232	1,03	0,000
Jumlah				1,529

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

$$X_E = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{1,529}{3} = 0,5096$$

3) Indeks *Share*

Indeks *Share* Pendapatan Asli Daerah terhadap Total belanja memperlihatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan Biaya Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berikut ini adalah perhitungan Indeks *Share* Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014:

$$\text{Share } (\%) = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

Tabel 27. Perhitungan Nilai *Share* APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Belanja (Rp)	Nilai (%)
2012	1,004,063,125,812.33	2,053,825,959,467.00	0.4889
2013	1,216,102,749,617.01	2,509,643,375,218.35	0.4846
2014	1,464,604,954,200.16	2,981,068,320,421.41	0.4913

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Tabel 28. Perhitungan Indeks *Share* APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Nilai - Kondisi Minimal (a)	Kondisi maksimal -Kondisi Minimal (b)	a/b (%)
2012	0.004302557	0.006730106	0.6393
2013	0	0.006730106	0.0000
2014	0.006730106	0.006730106	0.0000

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

Tabel 29. Indeks *Share* APBD Provinsi DIY
Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun	Nilai (%)	Kondisi Maksimal (%)	Kondisi Minimal (%)	Indeks (%)
2012	0,4889	0,4913	0,4846	0,6393
2013	0,4846	0,4913	0,4846	0,0000
2014	0,4913	0,4913	0,4846	0,0000
Jumlah				0,6393

Sumber: Data Sekunder Diolah (Realisasi APBD PEMDA DIY)

$$X_s = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{n} = \frac{0,6393}{3} = 0,2131$$

4) Indeks Kemampuan Keuangan

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dapat dianalisis dengan cara menghitung indeks kemampuan keuangan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

$$IKK = \frac{0,4868 + 0,5096 + 0,2131}{3} = 0,40318$$

Hasil perhitungan skala Indeks Kemampuan Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 menunjukkan angka 0,40318. Skala Indeks Kemampuan Keuangan tersebut termasuk dalam kategori sedang, namun bukan berarti bahwa Daerah Istimewa belum mampu mandiri. Berdasarkan rasio kemandirian, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau dapat pula dikatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mandiri meskipun hasil Indeks Kemampuan Keuangan tersebut

menunjukkan angka sedang. Hal ini berarti Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mampu mandiri sesuai tujuan otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya perlu menggali potensi lokal agar Indeks Kemampuan Keuangan dapat tercapai tanpa menghilangkan fungsi otonomi daerah.

Tabel 30. Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja dan Kemampuan Keuangan

Variabel	Indikator	Standar Parsial	Hasil
Kinerja Keuangan	Rasio Kemandirian	1. Instrukturif 2. Konsultatif 3. Partisipasif 4. Delegatif	Delegatif
	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	1. Sangat Kurang 2. Kurang 3. Sedang 4. Cukup 5. Baik 6. Sangat Baik	Baik
	Rasio Efektivitas	1. Sangat Efektif 2. Efektif 3. Cukup Efektif 4. Kurang Efektif 5. Tidak Efektif	Sangat Efektif
	Rasio Aktivitas a. Rasio Belanja Aparatur b. Rasio Belanja Publik	Belanja Publik lebih besar dari pada belanja aparatur	Belanja aparatur lebih besar dari pada belanja publik
	Rasio Keceragaman Belanja a. Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja b. Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja	Belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung	Belanja Tidak Langsung lebih besar daripada belanja langsung
Kemampuan Keuangan Daerah	<i>Share</i> dan <i>Growth</i> Peta Kemampuan Keuangan Daerah (Metode Kuadran)	1. Kuadran I 2. Kuadran II 3. Kuadran III 4. Kuadran IV	Kuadran I (Ideal) <i>Share</i> : Tinggi <i>Growth</i> : Tinggi
	Indeks Kemampuan Keuangan	1. Rendah 2. Sedang 3. Tinggi	Sedang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Kemandirian berada dalam kriteria delegatif. Pola hubungan delegatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
2. Kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada dalam kriteria baik, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung besar.
3. Kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Efektivitas berada dalam kriteria sangat efektif. Hal ini berarti pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mampu dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan.

4. Kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Aparatur dibandingkan untuk Belanja Publik artinya kebermanfaatan dana yang dikeluarkan untuk masyarakat masih kurang.
5. Kinerja keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan untuk Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung meliputi: belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Hal ini berpengaruh pada kualitas *output* yang dihasilkan menjadi tidak optimal.
6. Kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan *Share and Growth* APBD menunjukkan bahwa rata-rata nilai *share* sebesar 48,8%, hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah mampu berperan dalam membiayai APBD. Rata-rata nilai *growth* sebesar 19,1%; hal ini berarti

laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong besar.

7. Kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Peta Kemampuan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa sumbangan (*share*) Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD tinggi dan pertumbuhan (*growth*) Pendapatan Asli Daerah tinggi, sehingga Peta Kemampuan Keuangan Daerah terletak pada Kuadran I atau dalam kondisi ideal. Hal ini berarti sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja tinggi, diikuti dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi.
8. Kemampuan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang diproksikan dengan perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) diperoleh skala indeks menunjukkan angka 0,40318. Hal ini berarti Kemampuan Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong sedang, artinya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kemampuan keuangan yang sedang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi DIY

- a. Berdasarkan perhitungan Rasio Aktivitas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Aparatur dibandingkan dengan kegiatan Belanja Publik. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Publik yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang meliputi tiga bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, karena belanja langsung sangat memengaruhi kualitas *output* kegiatan. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya dapat meningkatkan Belanja Langsung agar kualitas *outputnya* meningkat, dan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian yang sama disarankan untuk melakukan studi eksplorasi pada setiap komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga hasil penelitian pada komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BAPPENAS. (2003). *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. (2010). “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007”. *Jurnal GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3*. Hlm. 75-86.
- Darminto, Dwi Prastowo. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- DPPKA DIY. (2014). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2013*. LAKIP DPPKA DIY.
- Halim, Abdul. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah –Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah –Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah –Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah –Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah –Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaeng, Aprisilia Ristia dan David P.E. Saerang. (2015). “Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon”. *Jurnal EMBA Vol. 3 No. 2*. Hlm. 958-965.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhibtari, Astriana Nabila. (2014). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- _____. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- _____. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Pramono, Joko. (2014). “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)”. *Jurnal Among Makarti Vol. 7 No. 13*. Hlm. 83-112.
- Rahmatina, Aulia Zhufinsa Nur. (2011). “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009”. *Skripsi*. Institut Manajemen Telkom Bandung.
- Renyowijoyo, Muindro. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sijabat, Mentari Yosephen, Choirul Shaleh dan Abdul Wachid. (2013). “Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 No. 2*. Hlm. 236-242.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Syamsi, Ibnu. (1986). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.

Ulum, Iyahul. (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yin, Robert K. (2009). *Studi Kasus-Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi PERMENDAGRI Tahun 2012**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1.	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	917.957.788.795,00	1.004.063.125.812,33	86.105.337.017,33	109,38
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	805.095.980.000,00	871.630.605.393,00	66.534.625.393,00	108,26
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	32.149.648.150,00	34.115.157.619,03	1.965.509.469,03	106,11
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.572.913.845,00	35.492.532.563,21	(80.381.281,79)	99,77
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.139.246.800,00	62.824.830.237,09	17.685.583.437,09	139,18
1.2	Dana Perimbangan	873.661.154.754,00	894.544.324.851,00	20.883.170.097,00	102,39
1.2.1	Dana Bagi Hasil	97.551.718.754,00	118.434.888.851,00	20.883.170.097,00	121,41
1.2.2	Dana Alokasi Umum	757.056.696.000,00	757.056.696.000,00	-	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	19.052.740.000,00	19.052.740.000,00	-	100,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	286.566.807.000,00	273.126.857.000,00	(13.439.950.000,00)	95,31
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.775.867.000,00	6.568.977.000,00	793.110.000,00	113,73
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	280.790.940.000,00	266.557.880.000,00	(14.233.060.000,00)	94,93
	JUMLAH PENDAPATAN	2.078.185.750.549,00	2.171.734.307.663,33	93.548.557.114,33	104,50
2.	BELANJA				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.310.184.282.987,00	1.239.114.375.495,00	(71.069.907.492,00)	94,58
2.1.1	Belanja Pegawai	479.688.076.525,00	455.794.239.590,00	(23.893.836.935,00)	95,02
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	406.004.124.000,00	369.002.245.000,00	(37.001.879.000,00)	90,89
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	24.153.330.000,00	24.153.330.000,00	-	100,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	314.308.555.000,00	314.308.555.000,00	-	100,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	81.669.345.362,00	74.683.445.362,00	(6.985.900.000,00)	91,45
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.360.852.100,00	1.172.560.543,00	(3.188.291.557,00)	26,89

**Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi PERMENDAGRI Tahun 2012**

<i>Lanjutan...</i>		(Dalam Rupiah)			
Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
2.2	Belanja Langsung	974.955.792.748,00	814.711.583.972,00	(160.244.208.776,00)	83,56
2.2.1	Belanja Pegawai	124.922.323.183,00	116.229.477.602,00	(8.692.845.581,00)	93,04
2.2.2	Belanja Barang Jasa	569.954.139.741,00	482.062.123.930,00	(87.892.015.811,00)	84,58
2.2.3	Belanja Modal	280.079.329.824,00	216.419.982.440,00	(63.659.347.384,00)	77,27
	JUMLAH BELANJA	2.285.140.075.735,00	2.053.825.959.467,00	(231.314.116.268,00)	89,88
	SURPLUS / DEFISIT	(206.954.325.186,00)	117.908.348.196,33	324.862.673.382,33	56,97
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	269.529.213.644,00	269.529.213.643,23	(0,77)	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	12.084.619.518,00	23.019.937.048,00	10.935.317.530,00	190,49
3.1.8	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.116.069.024,00	1.059.442.165,00	(56.626.859,00)	94,93
	JUMLAH PENERIMAAN	282.729.902.186,00	293.608.592.856,23	10.878.690.670,23	103,85
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.775.577.000,00	32.275.000.000,00	(43.500.577.000,00)	42,59
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang Belum terselesaikan	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN	75.775.577.000,00	32.275.000.000,00	(43.500.577.000,00)	42,59
	Pembiayaan Netto	206.954.325.186,00	261.333.592.856,23	54.379.267.670,23	126,28
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		379.241.941.052,56	379.241.941.052,56	

Yogyakarta, 22 Juli 2013

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TTD

HAMENGKU BUWONO X

**Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi PERMENDAGRI Tahun 2013**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1.	PENDAPATAN	2.658.370.090.569,00	2.583.056.763.524,01	(116.806.724.967,99)	97,17
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.151.006.344.797,00	1.216.102.749.617,01	23.603.006.897,01	105,66
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.021.820.720.000,00	1.063.314.117.923,00		104,06
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	35.715.599.098,00	38.043.014.004,85	2.327.414.906,85	106,52
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.411.499.192,00	40.817.517.188,12	406.017.996,12	101,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.058.526.507,00	73.928.100.501,04	20.869.573.994,04	139,34
1.2	Dana Perimbangan	964.396.534.022,00	957.561.850.914,00	(6.834.683.108,00)	99,29
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	101.565.866.022,00	94.731.182.914,00	(6.834.683.108,00)	93,27
1.2.2	Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	-	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	34.495.900.000,00	-	100,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	542.967.211.750,00	409.392.162.993,00	(133.575.048.757,00)	75,40
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.815.476.250,00	10.291.886.370,00	1.476.410.120,00	116,75
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	534.151.735.500,00	399.100.276.623,00	(135.051.458.877,00)	74,72
	JUMLAH PENDAPATAN	2.658.370.090.569,00	2.583.056.763.524,01	(116.806.724.967,99)	97,17
2.	BELANJA	2.917.270.974.520,00	2.509.643.375.218,35	(407.627.599.301,65)	86,02
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.530.012.706.032,00	1.440.462.296.966,78	(89.550.409.065,22)	94,14
2.1.1	Belanja Pegawai	502.167.592.140,00	491.077.276.246,00	(11.090.315.894,00)	97,79
2.1.2	Belanja Hibah	500.494.194.950,00	437.147.781.000,00	(63.346.413.950,00)	87,33
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	23.062.809.309,00	12.509.468.500,00	(10.553.340.809,00)	54,24
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab /Kota dan Pemerintah Desa	376.702.290.859,00	376.702.290.858,78	(0,22)	100,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab /Kota dan Pemerintah Desa	124.994.680.362,00	123.025.480.362,00	(1.969.200.000,00)	98,42
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	2.591.138.412,00	-	(2.591.138.412,00)	-

**Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi PERMENDAGRI Tahun 2013**

Lanjutan... (Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
2.2	Belanja Langsung	1.387.258.268.488,00	1.069.181.078.251,57	(318.077.190.236,43)	77,07
2.2.1	Belanja Pegawai	185.179.435.834,00	143.754.843.434,00	(41.424.592.400,00)	77,63
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	788.899.618.313,00	556.030.440.778,57	(232.869.177.534,00)	70,48
2.2.3	Belanja Modal	413.179.214.341,00	369.395.794.039,00	(43.783.420.302,00)	89,40
	JUMLAH BELANJA	2.917.270.974.520,00	2.509.643.375.218,35	(407.627.599.301,65)	86,02
	SURPLUS / DEFISIT	(258.900.883.952,00)	73.413.388.305,66	332.314.272.257,66	(28,39)
3.	PEMBIAYAAN	258.900.883.952,00	308.606.708.592,00	49.705.824.640,00	119,20
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	385.339.434.228,00	403.200.658.867,84	17.861.224.639,84	104,64
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	379.241.941.053,00	379.241.941.052,56	(0,44)	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	3.224.600.842,00	3.224.600.842,28	0,28	100,00
3.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.506.301.320,00	20.367.526.960,00	17.861.225.640,00	812,65
3.1.4	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	366.591.013,00	366.590.013,00	(1.000,00)	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN	385.339.434.228,00	403.200.658.867,84	17.861.224.639,84	104,64
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	(31.844.600.000,00)	74,81
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	(31.844.600.000,00)	74,81
	JUMLAH PENGELUARAN	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	(31.844.600.000,00)	74,81
	Pembiayaan Netto	258.900.883.952,00	308.606.708.591,84	49.705.824.640,00	119,20
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	382.020.096.897,50	382.020.096.897,50	-

Yogyakarta, 31 Desember 2013

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TTD

HAMENGKU BUWONO X

**Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi PERMENDAGRI Tahun 2014**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1.	PENDAPATAN	3.155.760.939.182,27	3.139.871.880.417,16	(15.889.058.765,11)	99,50
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.342.290.475.580,27	1.464.604.954.200,16	122.314.478.619,89	109,11
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.202.117.342.494,00	1.291.664.420.808,00	89.547.078.314,00	107,45
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	40.682.507.208,00	44.595.094.779,94	3.912.587.571,94	109,62
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.063.944.818,32	48.247.880.493,70	183.935.675,38	100,38
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.426.681.059,95	80.097.558.118,52	28.670.877.058,57	155,75
1.2	Dana Perimbangan	1.046.227.488.649,00	1.013.811.389.590,00	(32.416.099.059,00)	96,90
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	109.172.328.649,00	76.756.229.590,00	(32.416.099.059,00)	70,31
1.2.2	Dana Alokasi Umum	899.923.550.000,00	899.923.550.000,00	-	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	37.131.610.000,00	37.131.610.000,00	-	100,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	767.242.974.953,00	661.455.536.627,00	(105.787.438.326,00)	86,21
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.969.411.400,00	8.822.952.137,00	(146.459.263,00)	98,37
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	758.273.563.553,00	652.632.584.490,00	(105.640.979.063,00)	86,07
	JUMLAH PENDAPATAN	3.155.760.939.182,27	3.139.871.880.417,16	(15.889.058.765,11)	99,50
2.	BELANJA	3.466.745.462.269,77	2.981.068.320.421,41	(485.677.141.848,36)	85,99
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.663.950.552.723,10	1.560.157.355.822,47	(103.793.196.900,63)	93,76
2.1.1	Belanja Pegawai	523.308.261.027,25	512.498.970.935,00	(10.809.290.092,25)	97,93
2.1.2	Belanja Hibah	492.157.257.993,00	441.914.970.000,00	(50.242.287.993,00)	89,79
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	14.631.602.000,00	9.919.078.000,00	(4.712.524.000,00)	67,79
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	472.309.827.352,47	472.309.827.352,47	-	100,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	130.851.204.562,00	121.560.574.535,00	(9.290.630.027,00)	92,90
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	30.692.399.788,38	1.953.935.000,00	(28.738.464.788,38)	6,37

**Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi PERMENDAGRI Tahun 2014**

<i>Lanjutan...</i>		(Dalam Rupiah)			
Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
2.2	Belanja Langsung	1.802.794.909.546,67	1.420.910.964.598,94	(381.883.944.947,73)	78,82
2.2.1	Belanja Pegawai	119.273.305.603,00	111.425.291.725,00	(7.848.013.878,00)	93,42
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.099.717.364.859,67	867.039.199.272,94	(232.678.165.586,73)	78,84
2.2.3	Belanja Modal	583.804.239.084,00	442.446.473.601,00	(141.357.765.483,00)	75,79
	JUMLAH BELANJA	3.466.745.462.269,77	2.981.068.320.421,41	(485.677.141.848,36)	85,99
	SURPLUS / DEFISIT	(310.984.523.087,50)	158.803.559.995,75	469.788.083.083,25	(51,06)
3.	PEMBIAYAAN	310.984.523.087,50	339.527.178.236,50	28.542.655.149,00	109,18
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	382.020.096.897,50	389.527.178.236,50	7.507.081.339,00	101,97
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	382.020.096.897,50	382.020.096.897,50	-	100,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	7.507.081.339,00	7.507.081.339,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN	382.020.096.897,50	389.527.178.236,50	7.507.081.339,00	101,97
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	71.035.573.810,00	50.000.000.000,00	(21.035.573.810,00)	70,39
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	71.035.573.810,00	50.000.000.000,00	(21.035.573.810,00)	70,39
	JUMLAH PENGELUARAN	71.035.573.810,00	50.000.000.000,00	(21.035.573.810,00)	70,39
	Pembiayaan Netto	310.984.523.087,50	339.527.178.236,50	28.542.655.149,00	109,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	498.330.738.232,25	498.330.738.232,25	-

Yogyakarta, 31 Desember 2014

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TTD

HAMENGKU BUWONO X

**Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2012**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	URAIAN	Anggaran 2012	Realisasi 2012	(%)	Realisasi 2011
1.	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	805.095.980.000,00	871.630.605.393,00	108,26	735.226.105.916,20
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	32.149.648.150,00	34.115.157.619,03	106,11	35.985.658.458,15
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	35.572.913.845,00	35.492.532.563,21	99,77	28.961.383.472,76
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.139.246.800,00	62.824.830.237,09	139,18	66.939.737.505,76
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	917.957.788.795,00	1.004.063.125.812,33	109,38	867.112.885.352,87
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	92.828.718.781,00	112.691.591.066,00	121,40	75.967.201.558,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.080.800,00	4.713.992,00	115,52	6.070.523.495,00
1.2.1.3	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	4.718.919.173,00	5.738.583.793,00	121,61	-
1.2.1.4	Dana Alokasi Umum	757.056.696.000,00	757.056.696.000,00	100,00	620.812.328.000,00
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus	19.052.740.000,00	19.052.740.000,00	100,00	19.489.600.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	873.661.154.754,00	894.544.324.851,00	102,39	722.339.653.053,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	280.790.940.000,00	266.557.880.000,00	94,93	9.142.321.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	280.790.940.000,00	266.557.880.000,00	94,93	9.142.321.000,00
	Total Pendapatan Transfer	1.154.452.094.754,00	1.161.102.204.851,00	100,58	731.481.974.053,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.775.867.000,00	6.568.977.000,00	113,73	6.315.972.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.775.867.000,00	6.568.977.000,00	113,73	6.315.972.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah	5.775.867.000,00	6.568.977.000,00	113,73	6.315.972.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.078.185.750.549,00	2.171.734.307.663,33	104,50	1.604.910.831.405,87
2.	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai	604.610.399.708,00	572.023.717.192,00	94,61	498.752.591.040,00
2.1.2	Belanja Barang	470.996.930.850,00	392.928.507.010,00	83,42	374.323.534.963,00
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	504.961.332.891,00	458.135.861.920,00	90,73	17.578.561.700,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	24.153.330.000,00	24.153.330.000,00	100,00	114.820.604.720,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	81.669.345.362,00	74.683.445.362,00	91,45	145.929.020.362,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.686.391.338.811,00	1.521.924.861.484,00	90,25	1.151.404.312.785,00
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah	54.975.752.675,00	29.675.271.296,00	53,98	16.949.991.130,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	64.590.314.928,00	55.983.530.179,00	86,67	21.452.555.619,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	101.547.663.720,00	76.882.359.043,00	75,71	51.371.196.438,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.784.054.215,00	51.869.478.867,00	91,35	45.164.307.321,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.704.510.986,00	1.543.435.555,00	90,55	1.244.652.390,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	477.033.300,00	465.907.500,00	97,67	6.611.130.080,00
	Jumlah Belanja Modal	280.079.329.824,00	216.419.982.440,00	77,27	142.793.832.978,00

**Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2012**

Lanjutan...

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	URAIAN	Anggaran 2012	Realisasi 2012	(%)	Realisasi 2011
2.3	BELANJA TAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tak Terduga	4.360.852.100,00	1.172.560.543,00	26,89	23.248.882,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	4.360.852.100,00	1.172.560.543,00	26,89	23.248.882,00
	JUMLAH BELANJA	1.970.831.520.735,00	1.739.517.404.467,00	88,26	1.294.221.394.645,00
2.4	TRANSFER				
2.4.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	310.852.534.000,00	310.852.534.000,00	100,00	261.779.486.000,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	3.456.021.000,00	3.456.021.000,00	100,00	3.485.463.000,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	-	2.782.391.000,00
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota	314.308.555.000,00	314.308.555.000,00	100,00	268.047.340.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.285.140.075.735,00	2.053.825.959.467,00	89,88	1.562.268.734.645,00
	SURPLUS / DEFISIT	(206.954.325.186,00)	117.908.348.196,33	56,97	42.642.096.760,87
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Perhitungan Anggaran (SiLPA)	269.529.213.644,00	269.529.213.643,23	100,00	232.076.541.506,36
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	20.885.008.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	12.084.619.518,00	23.019.937.048,00	190,49	-
3.1.8	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1.116.069.024,00	1.059.442.165,00	94,93	1.270.414.276,00
	Jumlah Penerimaan	282.729.902.186,00	293.608.592.856,23	103,85	254.231.963.782,36
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.775.577.000,00	32.275.000.000,00	42,59	2.600.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	23.225.000.000,00
3.2.5	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	-	1.519.846.900,00
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang belum Terselamatkan	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	75.775.577.000,00	32.275.000.000,00	42,59	27.344.846.900,00
	PEMBIAYAAN NETO	206.954.325.186,00	261.333.592.856,23	126,28	226.887.116.882,36
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	379.241.941.052,56	-	269.529.213.643,23

Yogyakarta, 22 Juli 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

**Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2013**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	URAIAN	Anggaran 2013	Realisasi 2013	(%)	Realisasi 2012
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.658.370.090.569,00	2.583.056.763.524,01	97,17	2.171.734.307.663,33
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.151.006.344.797,00	1.216.102.749.617,01	105,66	1.004.063.125.812,33
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.021.820.720.000,00	1.063.314.117.923,00	104,06	871.630.605.393,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	35.715.599.098,00	38.043.014.004,85	106,52	34.115.157.619,03
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.411.499.192,00	40.817.517.188,12	101,00	35.492.532.563,21
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.058.526.507,00	73.928.100.501,04	139,33	62.824.830.237,09
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.498.548.269.522,00	1.356.662.127.537,00	90,53	1.161.102.204.851,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	964.396.534.022,00	957.561.850.914,00	99,29	894.544.324.851,00
1.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.736.872.088,00	88.291.984.791,00	92,22	112.691.591.066,00
1.2.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	5.828.993.934,00	6.439.198.123,00	110,47	5.743.297.785,00
1.2.1.3	Pendapatan Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	828.334.768.000,00	100,00	757.056.696.000,00
1.2.1.4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	34.495.900.000,00	100,00	19.052.740.000,00
1.2.2	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	534.151.735.500,00	399.100.276.623,00	74,72	266.557.880.000,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	231.392.653.500,00	115.696.326.500,00	50,00	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	302.759.082.000,00	283.403.950.123,00	93,61	266.557.880.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.815.476.250,00	10.291.886.370,00	116,75	6.568.977.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.815.476.250,00	10.291.886.370,00	116,75	6.568.977.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.658.370.090.569,00	2.583.056.763.524,01	97,17	2.171.734.307.663,33
2.	BELANJA DAERAH	2.917.270.974.520,00	2.509.643.375.218,35	86,02	2.053.825.959.467,00
2.1	BELANJA OPERASI	1.999.803.650.546,00	1.640.519.809.958,57	82,03	1.521.924.861.484,00
2.1.1	Belanja Pegawai	687.347.027.974,00	634.832.119.680,00	92,36	572.023.717.192,00
2.1.2	Belanja Barang	649.751.792.338,00	449.868.675.222,57	69,24	482.062.123.930,00
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	639.268.520.925,00	542.939.546.556,00	84,93	369.002.245.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	23.436.309.309,00	12.879.468.500,00	54,96	24.153.330.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	74.683.445.362,00
2.2	BELANJA MODAL	413.179.214.341,00	369.395.794.039,00	89,40	216.419.982.440,00
2.2.1	Belanja Tanah	30.909.555.500,00	28.310.643.457,00	91,59	29.675.271.296,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	96.008.802.145,00	78.059.776.458,00	81,30	55.983.530.179,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	107.155.685.047,00	93.938.285.734,00	87,67	76.882.359.043,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	173.361.426.139,00	164.544.588.860,00	94,91	51.869.478.867,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.695.051.270,00	3.597.456.530,00	76,62	1.543.435.555,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.048.694.240,00	945.043.000,00	90,12	465.907.500,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.591.138.412,00	-	-	1.172.560.543,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.591.138.412,00	-	-	1.172.560.543,00
	JUMLAH BELANJA	2.415.574.003.300,00	2.009.915.603.997,57	83,20	1.739.517.404.467,00
2.4	TRANSFER	501.696.971.221,00	499.727.771.220,78	99,61	314.308.555.000,00
2.4.1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota	376.702.290.859,00	376.702.290.858,78	100,00	314.308.555.000,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	376.702.290.859,00	376.702.290.858,78	100,00	310.852.534.000,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	3.456.021.000,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-

**Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2013**

Lanjutan...

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	URAIAN	Anggaran 2013	Realisasi 2013	(%)	Realisasi 2012
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	124.994.680.362,00	123.025.480.362,00	98,42	-
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota	18.624.000.000,00	18.519.600.000,00	99,44	-
2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	21.900.000.000,00	21.900.000.000,00	100,00	-
2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota Yang Bersifat Khusus	83.409.000.000,00	81.544.200.000,00	97,76	-
2.4.2.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.061.680.362,00	1.061.680.362,00	100,00	-
	SURPLUS/DEFISIT	(258.900.883.952,00)	73.413.388.305,66	28,39	117.908.348.196,33
3.	PEMBIAYAAN	258.900.883.952,00	497.794.609.143,84	119,20	261.333.592.856,23
3.1	Penerimaan Daerah	385.339.434.228,00	403.200.658.867,84	104,64	293.608.592.856,23
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Perhitungan Anggaran (SiLPA)	379.241.941.053,00	379.241.941.052,56	100,00	269.529.213.643,23
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	3.224.600.842,00	3.224.600.842,28	100,00	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.506.301.320,00	20.367.526.960,00	812,65	23.019.937.048,00
3.1.8	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	366.591.013,00	366.590.013,00	100,00	1.059.442.165,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	385.339.434.228,00	403.200.658.867,84	104,64	293.608.592.856,23
3.2	Pengeluaran Daerah	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	74,81	32.275.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	74,81	32.275.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang belum Terselamatkan	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	126.438.550.276,00	94.593.950.276,00	74,81	32.275.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	258.900.883.952,00	308.606.708.591,84	119,20	261.333.592.856,23
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	382.020.096.897,50	-	379.241.941.052,56

Yogyakarta, 31 Desember 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

**Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2014**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	URAIAN	Anggaran 2014	Realisasi 2014	(%)	Realisasi 2013
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.155.760.939.182,27	3.139.871.880.417,16	99,50	2.583.056.763.524,01
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.342.290.475.580,27	1.464.604.954.200,16	109,11	1.216.102.749.617,01
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.202.117.342.494,00	1.291.664.420.808,00	107,45	1.063.314.117.923,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	40.682.507.208,00	44.595.094.779,94	109,62	38.043.014.004,85
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.063.944.818,32	48.247.880.493,70	100,38	40.817.517.188,12
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.426.681.059,95	80.097.558.118,52	155,75	73.928.100.501,04
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.804.501.052.202,00	1.666.443.974.080,00	92,35	1.356.662.127.537,00
1.2.1	Transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.046.227.488.649,00	1.013.811.389.590,00	96,90	957.561.850.914,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	103.137.240.292,00	70.324.849.321,00	68,19	88.291.984.791,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.035.088.357,00	6.431.380.269,00	106,57	6.439.198.123,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	899.923.550.000,00	899.923.550.000,00	100,00	828.334.768.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	37.131.610.000,00	37.131.610.000,00	100,00	34.495.900.000,00
1.2.2	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	758.273.563.553,00	652.632.584.490,00	86,07	399.100.276.623,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	462.740.572.553,00	357.965.628.003,00	77,36	115.696.326.500,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	295.532.991.000,00	294.666.956.487,00	99,71	283.403.950.123,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.969.411.400,00	8.822.952.137,00	98,37	10.291.886.370,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.969.411.400,00	8.822.952.137,00	98,37	10.291.886.370,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	3.155.760.939.182,27	3.139.871.880.417,16	99,50	2.583.056.763.524,01
2.	BELANJA DAERAH	3.466.745.462.269,77	2.981.068.320.421,41	85,99	2.509.643.375.218,35
2.1	BELANJA OPERASI	2.249.087.791.482,92	1.942.797.509.932,94	86,38	1.640.519.809.958,57
2.1.1	Belanja Pegawai	642.581.566.630,25	623.924.262.660,00	97,10	634.832.119.680,00
2.1.2	Belanja Barang	835.356.617.854,67	697.030.165.607,94	83,44	449.868.675.222,57
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	756.360.684.998,00	611.770.903.665,00	80,88	542.939.546.556,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.788.922.000,00	10.072.178.000,00	68,11	12.879.468.500,00
2.2	BELANJA MODAL	583.804.239.084,00	442.446.473.601,00	75,79	369.395.794.039,00
2.2.1	Belanja Tanah	140.812.884.095,00	52.786.995.183,00	37,49	28.310.643.457,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	81.742.640.326,00	72.784.989.325,00	89,04	78.059.776.458,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	181.101.315.432,00	153.771.760.970,00	84,91	93.938.285.734,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	176.662.239.181,00	160.100.029.210,00	90,62	164.544.588.860,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.292.511.650,00	1.935.623.140,00	84,43	3.597.456.530,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.192.648.400,00	1.067.075.773,00	89,47	945.043.000,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	30.692.399.788,38	1.953.935.000,00	6,37	-
2.3.1	Belanja Tak Terduga	30.692.399.788,38	1.953.935.000,00	6,37	-
	JUMLAH BELANJA	2.863.584.430.355,30	2.387.197.918.533,94	83,36	2.009.915.603.997,57
2.4	TRANSFER	603.161.031.914,47	593.870.401.887,47	98,46	499.727.771.220,78
2.4.1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota	472.309.827.352,47	472.309.827.352,47	100,00	376.702.290.858,78
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	472.309.827.352,47	472.309.827.352,47	100,00	376.702.290.858,78
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	130.851.204.562,00	121.560.574.535,00	92,90	123.025.480.362,00
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	18.519.600.000,00
2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	26.260.000.000,00	19.988.500.000,00	76,12	21.900.000.000,00
2.4.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota yang Bersifat Khusus	88.529.524.200,00	85.510.774.200,00	96,59	81.544.200.000,00
2.4.2.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.061.680.362,00	1.061.300.335,00	99,96	1.061.680.362,00
	SURPLUS/DEFISIT	(310.984.523.087,50)	158.803.559.995,75	51,06	73.413.388.305,66

**Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
versi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tahun 2014**

Lanjutan...

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	URAIAN	Anggaran 2014	Realisasi 2014	(%)	Realisasi 2013
3.	PEMBIAYAAN	310.984.523.087,50	339.527.178.236,50	109,18	573.141.159.526,44
3.1	Penerimaan Pembiayaan	382.020.096.897,50	389.527.178.236,50	101,97	403.200.658.867,84
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Perhitungan Anggaran (SiLPA)	382.020.096.897,50	382.020.096.897,50	100,00	379.241.941.052,56
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	3.224.600.842,28
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	7.507.081.339,00	-	20.367.526.960,00
3.1.8	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	-	-	-	366.590.013,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	382.020.096.897,50	389.527.178.236,50	101,97	403.200.658.867,84
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	71.035.573.810,00	50.000.000.000,00	70,39	94.593.950.276,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	71.035.573.810,00	50.000.000.000,00	70,39	94.593.950.276,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang belum terselesaikan	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	71.035.573.810,00	50.000.000.000,00	70,39	94.593.950.276,00
	PEMBIAYAAN NETO	310.984.523.087,50	339.527.178.236,50	109,18	308.606.708.591,84
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	498.330.738.232,25	103,82	382.020.096.897,50

Yogyakarta, 31 Desember 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X